

1000



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II 2025

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan
Kabupaten Lumajang

Alamat

Jl. Letkol Slamet Wardoyo 43-45

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2025 guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (good government) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran tahun 2025 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Triwulan II Tahun 2025 ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja selama periode bulan April – Juni 2025 sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan dalam pencapaian kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan efisien.

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang akan datang.

Lumajang, 4 Juli 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN,
DAN PERDAGANGAN



MUHAMMAD RIDHA, S.Sos., M.Si.
NIP. 19731118 199303 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum	1
1.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	1
1.1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	3
1.1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah	9
1.1.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	10
1.2. Isu Strategis.....	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. Target Tujuan OPD.....	13
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
2.3. Program Dan Kegiatan Yang Mendukung IKU	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Pengukuran Kinerja	21
3.1.1. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis OPD s.d Triwulan II Tahun 2025	24
3.1.2. Capaian Kinerja Program Yang Menunjang Kinerja Sasaran OPD	23
3.1.3. Penyajian Data Kinerja	26
3.2. Analisis Capaian Kinerja	31
3.2.1. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan, Faktor Penghambat Dan Upaya/Solusi Mengatasi Hambatan Dalam Mencapai Kinerja	32
3.2.2. Analisis Efisiensi Sumber Daya	37
3.2.3. Analisis Program Yang Menunjang Keberhasilan	39
3.2.4. Realisasi Anggaran.....	50
BAB IV. PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL I

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai	9
Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana.....	10
Tabel 1.3 Isu – Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	11

TABEL II

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2025	13
Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2025	14
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2025	15
Tabel 2.4 Progam dan Kegiatan yang Mendukung IKU	16

TABEL III

Tabel 3.1 Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja	22
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Program yang Mendukung Sasaran Strategis....	24
Tabel 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
Tabel 3.4 Realisasi Anggaran 2025.....	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan	3
Gambar 3	
Gambar 3.1 Nilai PDRB Sektor Industri.....	23
Gambar 3.2 Nilai PDRB Sektor Perdagangan	31

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kedua regulasi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta pemanfaatan anggaran yang dipercayakan kepada masing-masing perangkat daerah.

Laporan kinerja disusun berdasarkan rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini menjadi bagian integral dari sistem manajemen kinerja yang tidak hanya menekankan pada capaian output, tetapi juga efektivitas, efisiensi, dan dampak dari program atau kegiatan yang dijalankan. Penyusunan LKjIP juga harus memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan, sebagaimana semangat mewujudkan prinsip-prinsip good governance.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kabupaten Lumajang menyusun Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 secara sistematis dan terukur. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata atas tingkat pencapaian kinerja berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi sarana evaluasi terhadap capaian kinerja dan pemanfaatan anggaran hingga pertengahan tahun anggaran 2025. Melalui laporan ini, Diskopindag berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kelembagaan secara konsisten, serta sebagai pijakan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan yang lebih baik pada periode berikutnya.

1.1. GAMBARAN UMUM

1.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

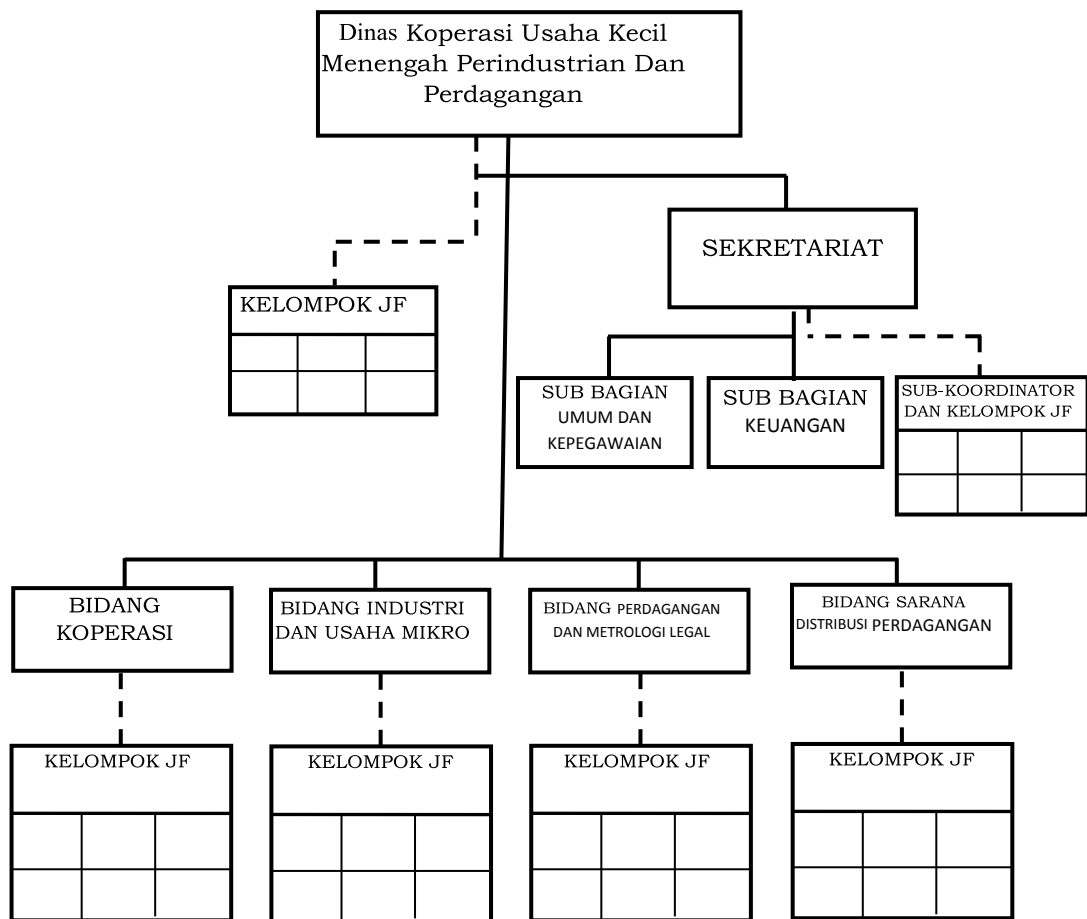
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021

tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan merupakan unsur penunjang/pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, perindustrian dan perdagangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, susunan organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Koperasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Usaha Mikro dan Industri, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Perdagangan dan Metrologi Legal, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan struktur organisasi dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan adalah sebagaimana berikut



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan

1.1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan melaksanakan tugas tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha mikro dan industri, perdagangan dan metrologi legal, serta sarana distribusi perdagangan;
2. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha mikro dan industri, perdagangan dan metrologi legal, serta sarana distribusi perdagangan;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro dan industri, perdagangan dan metrologi legal, serta sarana distribusi perdagangan;
4. pelaksanaan administrasi bidang koperasi, usaha mikro dan industri, perdagangan dan metrologi legal, serta sarana distribusi perdagangan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

❖ **Sekretariat,**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
2. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
3. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
4. pengelolaan urusan rumah tangga;
5. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan, dan peningkatan karier pegawai;
6. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
7. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
9. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
10. pengelolaan barang milik daerah;
11. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
12. pelaksanaan monitoring, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
13. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan

14. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

❖ **Bidang Koperasi,**

Bidang Koperasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan Bidang Koperasi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Koperasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kerja Bidang Koperasi;
2. penghimpunan dan mensosialisasikan peraturan perundangan-undangan di bidang koperasi;
3. pelaksanaan verifikasi data koperasi yang akurat;
4. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
5. pelaksanaan fasilitasi pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
6. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan bimbingan teknis perkoperasian dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia koperasi;
7. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kelembagaan koperasi dan kegiatan usaha koperasi;
8. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kerja sama usaha antar koperasi dan badan usaha lainnya (kemitraan usaha, akses permodalan usaha dan simpan pinjam koperasi);
9. pelaksanaan fasilitasi kerja sama pemasaran, akses permodalan dan akses pasar bagi koperasi;
10. pelaksanaan advokasi dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh koperasi;
11. pengoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam koperasi;
12. penyiapan bahan pertimbangan pemberian sanksi administratif kepada koperasi yang tidak melaksanakan kewajibannya baik koperasi skala nasional, provinsi dan kabupaten yang berdomisili di Daerah;
13. pengoordinasian penyediaan data keragaan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah/unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah;

14. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan keuangan koperasi, serta bimbingan teknis akuntansi usaha koperasi, perpajakan koperasi, administrasi dan keuangan koperasi;
15. pemberi bantuan bimbingan fasilitasi perkuatan permodalan, pengendalian usaha koperasi dan kelayakan usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi;
16. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi;
17. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
18. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

❖ **Bidang Usaha Mikro dan Industri,**

Bidang Usaha Mikro dan Industri mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan Bidang Usaha Mikro dan Industri. Dalam melaksanakan tugas Bidang Usaha Mikro dan Industri mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan dan penyusunan rencana kerja Bidang Usaha Mikro dan Industri;
2. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis bidang usaha mikro dan industri;
3. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis serta fasilitasi dalam pengembangan sarana, usaha dan produk usaha mikro dan industri;
4. pelaksanaan perencanaan dan pembangunan industri;
5. pelaksanaan fasilitasi pengawasan dan pengendalian izin usaha industri;
6. pengelolaan sistem informasi industri;
7. pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro dan industri;
8. pengoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
9. penyusunan pedoman dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;

10. pelaksanaan pembinaan dalam pengembangan usaha kerjasama antara usaha mikro dengan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar;
11. pengawasan terhadap pengembangan kerjasama dalam rangka pembinaan usaha dan manajemen industri dan usaha mikro;
12. pelaksanaan pembinaan penumbuhan wira usaha baru;
13. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan rencana kerja di Bidang Usaha Mikro dan Industri;
14. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Usaha Mikro dan Industri;
15. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

❖ **Bidang Perdagangan dan Metrologi Legal,**

Bidang Perdagangan dan Metrologi Legal mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan Bidang Perdagangan dan Metrologi Legal. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perdagangan dan Metrologi Legal mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan dan penyusunan rencana kerja Bidang Perdagangan dan Metrologi Legal;
2. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis bidang perdagangan dan metrologi legal;
3. pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan usaha, metrologi legal dan sarana perdagangan;
4. pelaksanaan fasilitasi pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri;
5. pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan perijinan perdagangan, pendaftaran perusahaan dan gudang;
6. pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian metrologi legal;
7. pelaksanaan kegiatan promosi dagang;
8. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;

9. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar tradisional/toko swalayan dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi dan seminar dagang) skala lokal;
10. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
11. pelaksanaan bimbingan teknis terkait dengan pengelolaan pasar tradisional;
12. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan di bidang perdagangan dan metrologi legal;
13. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

❖ **Bidang Sarana Distribusi Perdagangan,**

Bidang Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan Bidang Sarana Distribusi Perdagangan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perdagangan dan Metrologi Legal mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan dan penyusunan rencana kerja Bidang Sarana Distribusi Perdagangan;
2. perumusan kebijakan teknis di Bidang Sarana Distribusi Perdagangan;
3. pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sarana distribusi perdagangan dan potensi pasar;
4. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
5. penyediaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana perdagangan milik Pemerintah Daerah;
6. pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan monitoring pemanfaatan sarana perdagangan;
7. pengendalian dan pengawasan teknis terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;

8. penerbitan, pengawasan dan pengendalian tata kelola administrasi penyewaan tempat berjualan pada pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
9. fasilitasi pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi prasarana dan sarana, kebersihan, ketentraman dan ketertiban pasar rakyat maupun pasar modern;
10. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
11. pelaksanaan pemberdayaan dan koordinasi pengelola sarana distribusi perdagangan;
12. pembuatan laporan hasil pelaksanaan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
13. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

1.1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 239 orang (kondisi per 30 Juni 2025), dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Tabel Komposisi Pegawai

No	Jabatan Dalam Organisasi	Jenis Kelamin		Status Kepegawaian			Ijazah										Eselon			Ket.
		L	P	PNS	P3K	TKB	SD	SM P	SM A	D 1	D 2	D 3	D 4	S 1	S 2	S 3	2	3	4	
1.	Kepala	1		1											1		1			
2.	Sekretaris	1		1										1				1		
3.	Kepala Bidang	4		4										3	1			4		
4.	Kepala Sub Bagian	1	1	2										2					2	
5.	Pejabat Fungsional	16	9	15	10									23	2					
6.	Pejabat Pelaksana	44	3	47			3	5	37					2						
7.	Tenaga Kontrak	119	40			159	5	11	104	0	2	1	1	34	1					
Jumlah		186	53	70	10	159	8	16	141	0	2	1	1	65	5	0	1	5	2	

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, total pegawai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan per 30 Juni 2025 sebanyak 240 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 8 orang, pejabat fungsional sebanyak 25 orang, pejabat pelaksana sebanyak 47 orang. Pejabat PNS sebanyak 70 orang, PPPK sebanyak 10 orang dan tenaga kontrak sebanyak 159 orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan pada sebesar 78 % : 22 % dengan pegawai laki-laki sebanyak 186 orang dan perempuan sebanyak 53 orang.

1.1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan selain didukung oleh sumber daya manusia juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Adapun sarana prasarana pendukung yang tersedia pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan disajikan pada tabel 1.2. di bawah ini:

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana per Tanggal 30 Juni 2025

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan/kondisi barang
1	Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	54	Rusak ringan
2	Kendaraan Dinas Roda 3	Unit	13	Rusak ringan
3	Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	9	Rusak ringan
4	Laptop	Unit	22	Rusak ringan
5	Komputer	Unit	45	Rusak ringan
6	Printer	Unit	37	Rusak ringan
7	Kursi lipat	Unit	300	Rusak berat
8	Kursi eselon	Unit	23	baik
9	Meja	Unit	79	Rusak ringan
10	Lemari	Unit	75	Rusak ringan
11	AC	Unit	30	Baik
12	Pemadam Kebakaran	Unit	19	Baik
13	Bangunan Kantor	Unit	3	2 Bangunan rusak ringan 1 Bangunan rusak berat
14	Bangunan Pasar	Unit	49	Rusak ringan

1.2 ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan untuk melengkapi

tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan di periode mendatang.

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah diantaranya :

Tabel 1.3 Isu – Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Urusan	Isu Strategis
	Pembangunan Daerah
Koperasi dan Usaha Mikro	Penanggulangan Kemiskinan melalui memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro
	Penanganan Koperasi tidak aktif
	Peningkatan usaha anggota dan usaha koperasi
	Peningkatan status kesehatan koperasi khususnya koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam
	Peningkatan skala usaha mikro (UMKM naik kelas)
Perdagangan	Pengendalian harga dan ketersediaan Bapokting sebagai pengendali inflasi Kabupaten Lumajang
	Peningkatan promosi produk Kabupaten Lumajang
	Peningkatan Pertumbuhan PDRB Perdagangan
	Peningkatan tingkat kepatuhan Wajib Tera Ulang (WTU)
	Pengendalian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang tidak sesuai ketentuan
	Pengoptimalan Tata kelola Pasar Daerah
Perindustrian	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
	Perluasan akses pemasaran melalui kemitraan ke dalam dan luar daerah
	Pembangunan gedung sarana promosi bagi produk IKM

Urusan	Isu Strategis
	Pembangunan Daerah
	Peningkatan kerjasama bahan baku dengan penyedia
	Pemetaan persiapan kawasan industry
	Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. TARGET TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Target tujuan perangkat daerah yang tertuang pada indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta *mandat (core business)* yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan.

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 100.3.3.2/571/427.12/2023 tentang Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Terciptanya Ekonomi Wilayah yang bertumpu pada Sektor Pertanian dan Industri	Nilai PDRB sektor Industri	Rupiah	Nilai PDRB sektor Industri	BPS
2.	Meningkatnya investasi inklusif	Nilai Investasi	Rupiah	Nilai Investasi	DPMPTSP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	Prosentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri	%	(Nilai produksi industri tahun N - Nilai produksi tahun sebelumnya (N-1))/ Nilai produksi tahun sebelumnya (N-1) x 100%	Olah data DISKOPINDAG
2.	Meningkatnya kualitas Koperasi	Persentase koperasi yang taat akan peraturan perundang - undangan	%	Jumlah Koperasi yang RAT / Jumlah total Koperasi x 100%	Olah data DISKOPINDAG
3.	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Prosentase Usaha Mikro naik kelas	%	Jumlah UM naik Kelas / Jumlah UM x 100%	Olah data DISKOPINDAG
4.	Meningkatnya Nilai PDRB sektor Perdagangan	Nilai PDRB sektor Perdagangan	Milyar Rupiah	Nilai PDRB sektor Perdagangan	Olah data DISKOPINDAG

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan sebagaimana telah dicantumkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Target Tujuan/Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025
1.	Terciptanya Ekonomi Wilayah yang bertumpu pada Sektor Pertanian dan Industri	Nilai PDRB sektor Industri	5.984,04 milyar
2.	Meningkatnya investasi inklusif	Nilai Investasi	1.282.684,40 juta

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	Prosentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri	3,63
2.	Meningkatnya kualitas Koperasi	Persentase koperasi yang taat akan peraturan perundang - undangan	40,71
3.	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Prosentase Usaha Mikro naik kelas	0,01%
4.	Meningkatnya Nilai PDRB sektor Perdagangan	Nilai PDRB sektor Perdagangan	4.045,54 milyar

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renja dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2025 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2025.

Adapun perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan adalah

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	Prosentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri	3,63%
2.	Meningkatnya kualitas Koperasi	Persentase koperasi yang taat akan peraturan perundang - undangan	40,71%
3.	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Prosentase Usaha Mlkro naik kelas	0,01%
4.	Meningkatnya Nilai PDRB sektor Perdagangan	Nilai PDRB sektor Perdagangan	4.045,54 milyar

No	Program	Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.076.486.014
2.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	41.000.000
3.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	54.888.000
4.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	101.563.000
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.888.172.939
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.578.850.965
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	82.706.300
8.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	62.200.000
9.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	6.532.742.965
10.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	987.614.940
11.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	435.942.350
12.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	543.218.610
13.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	286.850.000
14.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.116.055.550
15.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	8.050.000
16.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	8.706.000
Jumlah		27.805.047.633

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG IKU (KINERJA DAN ANGGARAN)

Dalam mencapai target sasaran strategis Indikator Kinerja Utama yang tertuang di perjanjian kinerja Kepala Dinas Koperasi, UKM,

Perindustrian, dan Perdagangan tersebut, kinerja program dan kegiatan yang mendukung dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Progam dan Kegiatan yang Mendukung IKU
Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran / Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran (Rp)
1	Tujuan 1 Terciptanya Ekonomi Wilayah yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Industri	Nilai PDRB sektor Industri	5.984,04 milyar	1.132.811.550
	1. Sasaran 1 Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri	3,63%	1.132.811.550
	a. Program 1 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Meningkatnya Nilai produksi industri	Nilai produksi industri	Rp 1.491.388.500.00 0	1.116.055.550
	Kegiatan 1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Meningkatnya fasilitasi jumlah industri dalam rencana pembangunan	Jumlah industry dalam rencana pembangunan kabupaten yang difasilitasi	400 IKM	1.116.055.550
	b. Program 2 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Meningkatnya Jumlah rekomendasi perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Prosentase jumlah izin yang diterbitkan	100%	8.050.000
	Kegiatan 1 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah	Jumlah rekomendasi IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Yang Diterbitkan	2 dokumen	8.050.000
	c. Program 3 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Meningkatnya Jumlah Database IKM yang terupdate	Prosentase jumlah IKM yang mengupdate data di SIINAS	61,45%	8.706.000
	Kegiatan 1 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Jumlah dokumen informasi industri yang tersedia	Jumlah dokumen informasi industri yang tersedia	2 dokumen	8.706.000
2.	Tujuan 2 Meningkatnya investasi inklusif	Nilai Investasi	1.282,684,40 juta	26.672.236.083

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran / Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran (Rp)
	1. Sasaran 2 Meningkatnya kualitas Koperasi	Persentase koperasi yang taat akan peraturan perundang - undangan	40,71%	14.162.109.953
	a. Program 1 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	54,27%	41.000.000
	Kegiatan 1 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi	Jumlah koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam yang di periksa dan diawasi	100 koperasi	41.000.000
	b. Program 2 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	56,67%	54.888.000
	Kegiatan 1 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang sehat dan cukup sehat	68 koperasi	54.888.000
	c. Program 3 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Terlaksananya pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase koperasi yang mendapatkan pelatihan perkoperasian	40,74%	101.563.000
	Kegiatan 1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan perkoperasian	220 orang	101.563.000
	d. Program 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Terlaksananya pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan	22,98%	1.888.172.939
	Kegiatan 1 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pemberdayaan dan perlindungan koperasi	jumlah pemberdayaan SDM koperasi	124 orang	1.888.172.939

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran / Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran (Rp)
	2. Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro naik kelas	0,01%	3.661.557.265
	a. Program 1 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Meningkatkan UMKM yang diberdayakan	Persentase Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) yang Diberdayakan	0,9%	3.578.850.965
	Kegiatan 1 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro Yang difasilitasi usahanya	471 UM	3.578.850.965
	b. Program 2 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Meningkatkan Pengembangan UMKM	Persentase pengembangan usaha mikro	0,5%	82.706.300
	Kegiatan 1 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang mempunyai Omset antara 1-2 Milyar	10 usaha mikro	82.706.300
	3. Sasaran 4 Meningkatnya Nilai PDRB sektor Perdagangan	Nilai PDRB sektor Perdagangan	4.045,54 milyar	8.848.568.865
	a. Program 1 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Meningkatkan perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh izin usaha	Persentase perusahaan yang mendapat rekomendasi izin usaha	80%	62.200.000
	Kegiatan 1 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Meningkatkan jumlah rekomendasi TDG	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi TDG	100%	38.100.000
	Kegiatan 2 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase pengecer yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh izin usaha	50%	12.050.000
	Kegiatan 3 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan	Jumlah Pelaku Usaha yang	2 pelaku usaha	12.050.000

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran / Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran (Rp)
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Meningkatnya pelaku usaha yang terfasilitasi	difasilitasi		
	b. Program 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Meningkatnya Jumlah Pasar sesuai standar SNI	Persentase jumlah Pasar berstandar SNI	3,45%	6.532.742.965
	• Kegiatan 1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Terlaksananya Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun/ direhab	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun/ direhab	8 unit	5.414.564.965
	• Kegiatan 2 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Terselenggaranya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Prosentase pembinaan terhadap pedagang	11%	1.118.178.000
	c. Program 3 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Terkendalnya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Persentase pengendalian stabilisasi barang kebutuhan pokok dan barang penting	80%	987.614.940
	• Kegiatan 1 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Meningkatnya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting	Jumlah harga barang kebutuhan pokok yang dikendalikan	13 barang	899.289.940
	• Kegiatan 2 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Jumlah obyek pengawasan pupuk dan pestisida	Jumlah obyek pengawasan pupuk dan pestisida	168 unit	88.325.000
	d. Program 4 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Meningkatnya Nilai ekspor dan nilai perdagangan antar daerah	* Nilai ekspor * Nilai perdagangan antar daerah	*Rp 1.175.296.332.815,85 *Rp 5.924.944.703.361	435.942.350
	• Kegiatan 1 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Meningktanya Nilai Omzet Promosi dagang	Nilai omzet promosi dagang	450.000.000	435.942.350
	e. Program 5 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Meningkatnya Tingkat Kepatuhan WTU	Tingkat Kepatuhan WTU	80%	543.218.610
	• Kegiatan1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan meningkatnya jumlah WTU yang	jumlah WTU yang melaksanakan	2.047 unit	543.218.610

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran / Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran (Rp)
	melaksanakan tera, tera ulang	tera tera ulang		
	f. Program 6 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Meningkatnya pertumbuhan nilai perdagangan dalam daerah	Persentase pertumbuhan nilai perdagangan dalam daerah	5%	286.850.000
	• Kegiatan 1 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Meningkatnya Nilai perdagangan dalam daerah	Nilai perdagangan dalam daerah	Rp 8.604.645.491.050	286.850.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja baik triwulan maupun tahunan. Langkah perbandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Format pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja (Bernilai Positif), maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja (Bernilai Negatif), digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang digunakan skala ordinal nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
1.	> 90%	Sangat Tinggi
2.	> 75% - 90%	Tinggi
3.	> 65% - 75%	Sedang
4.	> 50% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

3.1.1 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis sampai Triwulan II Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2025 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 dengan realisasinya, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis s/d Triwulan II Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Total	Capaian (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.	Terciptanya Ekonomi Wilayah yang bertumpu pada Sektor Pertanian dan Industri	Nilai PDRB sektor Industri	5.984,04 milyar	-	-	-	-	Menunggu data BPS	belum diketahui
2.	Meningkatnya investasi inklusif	Nilai Investasi	1.282.684,40 juta	193.900 juta	-	-	-	193.900 juta	15,12
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Total	Capaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	Prosentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri	3,63%	-	-	-	-	direkap diakhir periode	belum diketahui
2.	Meningkatnya kualitas Koperasi	Persentase koperasi yang	40,7%	25	4	-	-	29	71

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Total	Capaian (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
		taat akan peraturan perundang – undangan							
3.	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Prosentase Usaha Mlkro naik kelas	0,01%	-	-	-	-	direkap diakhir periode	belum diketahui
4.	Meningkatnya Nilai PDRB sektor Perdagangan	Nilai PDRB sektor Perdagangan	4.045,54 milyar	-	-	-	3.969,54	Menunggu data BPS	belum diketahui

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

❖ **Tujuan :**

1. Indikator kinerja tujuan Terciptanya Ekonomi Wilayah yang bertumpu pada Sektor Pertanian dan Industri dengan indikator Nilai PDRB sektor Industri terealisasi nihil dengan capaian kinerja 0%, dikarenakan menunggu data BPS.
2. Indikator kinerja tujuan Meningkatnya Investasi Inklusif terealisasi sebesar nihil dengan capaian kinerja 15,12%, capaian masih tergolong sangat rendah dikarenakan merupakan realiasasi di triwulan I, sedangkan laporan triwulan II release tanggal 10 Juli 2025 (sumber data DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur : <https://dpmptsp.jatimprov.go.id/triwulan/#>).

❖ **Sasaran Strategis**

1. Indikator kinerja dengan capaian realisasi ≥ 100% sebanyak 0 indikator
2. Indikator kinerja dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator, yaitu sasaran Meningkatnya Kualitas Koperasi sebesar 29% sehingga capaiannya 71%. Menunjukkan kurangnya kesadaran koperasi dalam melaksanakan RAT secara tepat waktu.
3. Indikator kinerja yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 3 indikator yaitu sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor industri, meningkatnya kualitas usaha mikro, meningkatnya Nilai PDRB sektor Perdagangan dikarenakan menunggu data dari BPS.

3.1.2. Capaian Kinerja Program Yang Menunjang Kinerja Sasaran

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja program yang mendukung kinerja sasarkan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Program yang Mendukung Sasaran Strategis s/d Triwulan II Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi s.d TW II	Capaian
1	Tujuan 1 Terciptanya Ekonomi Wilayah yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Industri	Nilai PDRB sektor Industri	5.984,04 milyar	Menunggu data BPS	Belum diketahui
	Sasaran 1 Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri	3,63%	Direkap diakhir periode	Belum diketahui
	a. Program 1 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Meningkatnya Nilai produksi industri	Nilai produksi industri	Rp 1.491.388.500.000	Rp 483.624.842.126	32%
	b. Program 2 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Meningkatnya Jumlah rekomendasi perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Prosentase jumlah izin yang diterbitkan	100%	100%	100%
	c. Program 3 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Meningkatnya Jumlah Database IKM yang terupdate	Prosentase jumlah IKM yang mengupdate data di SIINAS	61,45%	0	0
2	Tujuan 2 Meningkatnya investasi inklusif	Nilai Investasi	1.282,684,40 juta	193.900 juta	15%
	Sasaran 2 Meningkatnya kualitas Koperasi	Persentase koperasi yang taat akan peraturan perundang - undangan	40,71%	29%	71%
	a. Program 1 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	54,27%	0,8%	2%
	b. Program 2 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	56,67%	96,05%	170%
	c. Program 3 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mendapatkan	40,74%	0	0

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi s.d TW II	Capaian
	Terlaksananya pendidikan dan latihan perkoperasian	pelatihan perkoperasian			
	d. Program 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Terlaksananya pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan	22,98%	0	0
	Sasaran 3 Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro naik kelas	0,01%	Direkap diakhir periode	Belum diketahui
	a. Program 1 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Meningkatkan UMKM yang diberdayakan	Persentase Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) yang Diberdayakan	0,9%	0,6%	71%
	b. Program 2 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Meningkatkan Pengembangan UMKM	Persentase pengembanan usaha mikro	0,5%	Direkap diakhir periode	Belum diketahui
	Sasaran 4 Meningkatkan Nilai PDRB sektor Perdagangan	Nilai PDRB sektor Perdagangan	4.045,54 milyar	Menunggu data BPS	Belum diketahui
	a. Program 1 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Meningkatkan perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh izin usaha	Persentase perusahaan yang mendapat rekomendasi izin usaha	80%	100%	125%
	b. Program 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Meningkatkan Jumlah Pasar sesuai standar SNI	Persentase jumlah Pasar berstandar SNI	3,45%	Direkap diakhir periode	Belum diketahui
	c. Program 3 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Terkendalinya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Persentase pengendalian tabilisasi barang kebutuhan pokok dan barang penting	80%	77%	96%
	d. Program 4 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Meningkatkan Nilai ekspor dan nilai perdagangan antar daerah	* Nilai ekspor * Nilai perdagangan antar daerah	*Rp 1.175.296.332.815,85 *Rp 5.924.944.703.361	*Rp 174.682.004.400 *Rp 129.614.313.068	* 15% *2%
	e. Program 5 PROGRAM	Tingkat	80%	35%	41%

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi s.d TW II	Capaian
	STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Meningkatnya Tingkat Kepatuhan WTU	Kepatuhan WTU			
	f. Program 6 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Meningkatnya pertumbuhan nilai perdagangan dalam daerah	Persentase pertumbuhan nilai perdagangan dalam daerah	5%	Direkap diakhir periode	Belum diketahui

❖ **Program pendukung kinerja sasaran**

1. Indikator kinerja dengan capaian realisasi ≥ 100% sebanyak 3 indikator yaitu indikator Prosentase jumlah izin yang diterbitkan, Persentase koperasi sehat dan cukup sehat, Persentase perusahaan yang mendapat rekomendasi izin usaha.
2. Indikator kinerja dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 8 indikator dikarenakan masih akan dilaksanakan di triwulan berikutnya.
3. Indikator kinerja yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 4 indikator dikarenakan hasil perhitungannya akan diketahui diakhir periode.

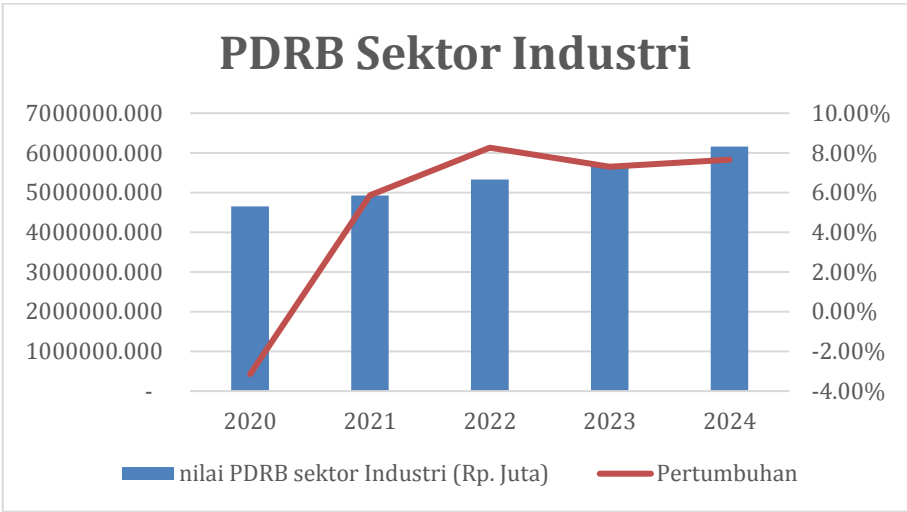
3.1.3. Penyajian Data Kinerja

Penyajian data kinerja adalah proses berisi informasi yang berkaitan dengan pencapaian atau hasil pengukuran kinerja dalam suatu periode waktu tertentu. Tujuan dari penyajian data kinerja adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai seberapa baik kinerja tersebut, sehingga bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, evaluasi, atau perencanaan tindak lanjut.

❖ **Tujuan 1 : Terciptanya Ekonomi Wilayah yang bertumpu pada Sektor Pertanian dan Industri**

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator tujuan Nilai PDRB sektor Industri yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 5.984,04 milyar sedangkan realisasinya masih nihil sehingga capaian kinerja 0%. Adapun perhitungan realisasi didapat dari hasil perhitungan data yang dilakukan oleh BPS. Adapun trend nilai PDRB sektor Industri tahun 2019 – 2024 ditunjukkan melalui grafik di bawah ini :

Gambar 3.1. Nilai PDRB Sektor Industri Kabupaten Lumajang



Sumber : BPS Lumajang

Berdasarkan data BPS tahun dasar 2010, secara kumulatif nilai PDRB sektor Industri pengolahan pada tahun 2023 mencapai Rp 5.718.901,0 juta rupiah dengan memberikan kontribusi sebesar 23,1% terhadap total PDRB yang mencapai nilai sebesar Rp. 24.808.350,1 juta rupiah pada tahun yang sama. Pertumbuhan kategori industri pengolahan mengalami peningkatan 7,30% dari tahun 2023. Berdasarkan trend pertumbuhan positif nilai PDRB dapat dilihat pada grafik di atas, nilai PDRB Sektor Industri tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 7,66%, seiring dengan beberapa kebijakan terkait pemulihan ekonomi nasional khususnya di sektor industri. Nilai PDRB Sektor Industri menjadi penyumbang kedua terbesar sebesar 23,29% terhadap nilai PDRB secara keseluruhan.

❖ **Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pertumbuhan sektor industri**

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Prosentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 3,6%, terealisasi sebesar nihil dengan capaian 0% atau tergolong capaian kinerjanya sangat rendah karena akan direkap akhir periode.

Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

- Nilai produksi industri tahun 2025 = Rp. 0,-

- Nilai produksi industri tahun 2024 = Rp. 1.336.456.746.287,-
- Target kinerja = 3,6%
- Realisasi Prosentase Pertumbuhan nilai produksi industri
 = (Nilai produksi industri tahun N - Nilai produksi tahun sebelumnya (N-1))/ Nilai produksi tahun sebelumnya (N-1) x 100%
 = (0 - 1.336.456.746.287)/ 1.336.456.746.287x 100%
 = 0%
- Capaian kinerja = Realisasi / target kinerja x 100%
 = 0/3,6 x 100%
 = 0%

Data Pertumbuhan Nilai Produksi Industri s.d TW 1 2025

Indikator	2024	2025
❖ T Nilai Produksi Industri	1.336.456.746.287,00	direkap di akhir periode
U Pertumbuhan (%)	2,50	direkap di akhir periode

Tujuan 2 : Meningkatnya investasi inklusif

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator tujuan Nilai Investasi yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 1.282.684,40 juta, terealisasi sebesar 193.900 Juta dengan capaian 15 % atau capaian kinerjanya tergolong sangat rendah dikarenakan merupakan realisasi triwulan I. .Sedangkan realiasasi triwulan II akan direlease ditanggal 10 Juli 2025. Indikator tujuan kedua ini saling beririsan atau *bercrosscutting* dengan indikator kinerja DPMPTSP. Adapun perhitungan realisasi didapat dari hasil perhitungan data yang dilakukan oleh DPMPTSP.

❖ **Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Koperasi**

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator persentase koperasi yang taat akan peraturan perundang - undangan yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 40,71% terealisasi sebesar 29% dengan capaian 71% atau tergolong capaian kinerjanya sedang.

Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

- Jumlah Koperasi yang RAT = 214 koperasi (sebagaimana terlampir)
- Jumlah total koperasi = 737 koperasi
- Target = 40,71%
- Realisasi Persentase koperasi yang taat akan peraturan perundang – undangan = $\frac{\text{Jumlah Koperasi yang RAT}}{\text{Jumlah total Koperasi}} \times 100\%$
 $= \frac{214}{737} \times 100\%$
 $= 29\%$
- Capaian = Realisasi / target kinerja $\times 100\%$
 $= \frac{29}{40,71} \times 100\%$
 $= 71\%$

Dari tabel diatas hal ini menggambarkan kurangnya kesadaran koperasi dalam melaksanakan RAT. Peran koperasi dalam perekonomian dapat dilihat dari: Posisinya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Penyedia lapangan kerja, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Peran koperasi, pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota koperasi lain, dan atau anggotanya yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan atau penggunaan dana tersebut (menurut Kepmen No.91/kep/IV/KUKM/DV/2004). Dapat diartikan koperasi sebagai wadah bagi masyarakat menyimpan dananya di koperasi sebagai investasi pengembangan usahanya atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu RAT Koperasi menjadi agenda penting bagi Koperasi dalam membangun koperasi yang sehat, berdaya saing, dan unggul untuk membangun kepercayaan masyarakat.

❖ **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro**

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator prosentase usaha mikro naik kelas yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 0,01% terealisasi sebesar nihil dengan capaian 0% atau tergolong capaian kinerjanya belum diketahui. Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

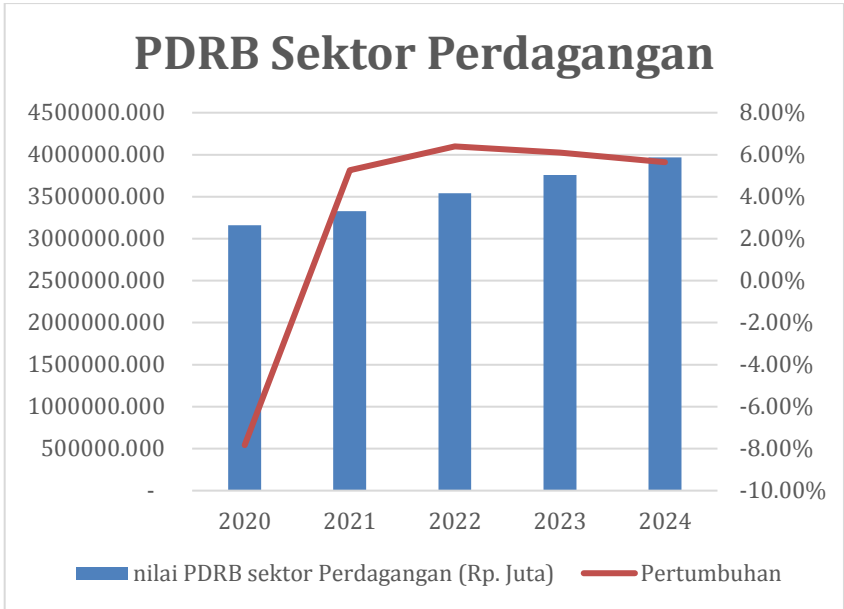
- Jumlah usaha mikro naik kelas = 0 unit (sebagaimana terlampir)
- Jumlah total usaha mikro = 54.975 unit (sebagaimana terlampir)
- Target = 0,01%
- Realisasi Prosentase Usaha Mikro naik kelas = $\frac{\text{Jumlah UM naik Kelas}}{\text{Jumlah UM}} \times 100\%$
 $= \frac{0}{54.975} \times 100\%$
 $= 0\%$
- Capaian = Realisasi / target kinerja x 100%
 $= \frac{0}{0,01} \times 100\%$
 $= 0\%$

❖ **Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Nilai PDRB sektor Perdagangan**

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Nilai PDRB sektor Perdagangan yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 4.045,54 milyar realisasi sebesar nihil sehingga capain kinerja sebesar 0%, dikarenakan menunggu perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan data yang dilakukan oleh BPS.

Adapun trend nilai PDRB sektor Perdagangan tahun 2019 – 2024 ditunjukkan melalui grafik di bawah ini :

Gambar 3.2. Nilai PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Lumajang



Dari grafik di atas pertumbuhan PDRB sektor perdagangan di Kabupaten Lumajang sejak tahun 2020-2024 fluktuatif, menunjukkan perkembangan pada tahun 2020-2024 (PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan). Nilai PDRB sektor Perdagangan tahun 2023 berkontribusi positif terhadap PDRB Kabupaten Lumajang. Hal ini tidak lepas dari peran sektor-sektor usaha perdagangan sebagai penyumbang atas terbentuknya PDRB tersebut. Semakin besar sumbangan atau peran suatu sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan perekonomian suatu daerah. Berdasarkan grafik di atas diperkirakan nilai PDRB Sektor Perdagangan mengalami kenaikan pada tahun 2023. Dengan adanya kenaikan nilai produksi dan nilai disektor perdagangan nilai PDRB Sektor Perdagangan mengalami kenaikan. Hal ini selaras dengan laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik Lumajang tahun 2024 mencatat pertumbuhan sebesar 5,65% (y-on-y). Peningkatan ini didorong oleh kenaikan ekspor barang dan jasa, terutama ke negara mitra dagang utama seperti Tiongkok, Jepang, dan Malaysia.

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1 Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan, Faktor Penghambat, Dan Upaya/Solusi Mengatasi Hambatan Dalam Mencapai Kinerja

Untuk mencapai kinerja yang optimal, terdapat berbagai faktor pendukung, faktor penghambat, dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai kinerja sesuai

target yang telah ditetapkan. Berikut adalah analisis lebih lanjut mengenai hal ini :

❖ **Tujuan 1** : Terciptanya Ekonomi Wilayah yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Industri

Tujuan Terciptanya Ekonomi Wilayah yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Industri dengan indikator Nilai PDRB sektor Industri, capaian kinerja tahun ini sebesar nihil karena menunggu hasil perhitungan BPS ditahun berikutnya. Hal yang mendukung tercapainya tujuan ini antara lain :

1. Terlaksananya pelatihan sebanyak 3 kegiatan
2. Terlaksananya pendampingan perolehan NIB bagi IKM sebanyak 105 telah terfasilitasi
3. Terlaksananya verifikasi teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri sebanyak 2 kegiatan

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

1. Kurangnya kesadaran IKM melaporkan data secara tepat waktu
2. Pemasaran yang digunakan bersifat konvensional

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi SI DILAN (telah dilaksanakan di triwulan II), melaksanakan pelatihan pembuatan konten pemasaran (telah dilaksanakan di triwulan II)
2. Melaksanakan pelatihan pemasaran online dan digital marketing (telah dilaksanakan di triwulan I)

❖ **Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya pertumbuhan sektor industri

Sasaran Meningkatnya pertumbuhan sektor industri Dengan indikator Prosentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri capaian kinerja tahun ini sebesar nihil (belum diketahui tercapai atau tidaknya), jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 2,5%, hal yang mendukung realisasi kinerja sasaran ini antara lain:

1. Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Konten Pemasaran Online bagi IK Aneka Keripik, Kopi dan Susu sebanyak 1 kegiatan
2. Terlaksananya pendampingan perolehan NIB bagi IKM sebanyak 105 telah terfasilitasi
3. Terlaksananya verifikasi teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri sebanyak 2 kegiatan
4. Terlaksananya pelatihan desain kemasan dan sosialisasi halal masing-masing 1 kegiatan

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa:

1. Pemasaran yang digunakan bersifat konvensional
2. Desain kemasan masih sederhana

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelatihan digital marketing, pelatihan pemasaran online (telah dilaksanakan ditriwulan I), pelatihan desain kemasan dan sosialisasi halal (telah dilaksanakan ditriwulan II);
2. Melaksanakan pelatihan desain kemasan bagi IK aneka keripik dan kopi (telah dilaksanakan ditriwulan I).

❖ **Tujuan 2** : Meningkatnya investasi inklusif

Tujuan Meningkatnya investasi inklusif dengan indikator nilai investasi, capaian kinerja triwulan ini sebesar belum diketahui karena menunggu data DPMPTSP, hal yang mendukung antara lain:

1. a. Terlaksananya pemantauan harga bahan pokok di 16 pasar daerah;
- b. Terlaksananya Pembentukan warung TIPD di 4 pasar daerah;
- c. Terlaksananya operasi pasar selama 17 kali yang tersebar di 13 titik lokasi untuk menanggulangi adanya kenaikan harga bahan pokok.
2. Terlaksananya pendampingan pengurusan NIB

3. Terlaksananya pendampingan pembentukan koperasi baru (koperasi tambang dan koperasi Desa Merah Putih)
4. Terlaksananya pendampingan RAT bagi koperasi

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa:

1. Indeks perkembangan harga sebesar 1,06% pada Minggu ke-4 bulan Juni 2025 masih dibawah target nasional sebesar 2,56% (dibuktikan dengan grafik Indeks Perkembangan Harga sebagaimana terlampir)

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemantauan harga bahan pokok
2. Melaksanakan operasi pasar

❖ **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas Koperasi**

Sasaran Meningkatnya kualitas Koperasi dengan indikator Persentase koperasi yang taat akan peraturan perundang - undangan capaian kinerja triwulan ini sebesar 71% belum dapat mencapai target 2025, namun terhadap target triwulan capaiannya sebesar 100%. Capaian sebesar 100% tersebut tidak luput dari adanya faktor pendukung yaitu

1. Terlaksananya pendampingan kepada koperasi untuk melaksanakan RAT;
2. Terlaksananya pengawasan dan pembinaan bagi pengurus koperasi untuk meningkatkan akuntabilitas koperasi;
3. Terlaksananya Kunjungan lapangan terhadap pengurus koperasi yang belum menyelenggarakan RAT sesuai kewajiban pengelolaan koperasi.

Faktor penghambat dalam mencapai target tersebut yaitu

1. Kurangnya kesadaran koperasi melaksanakan RAT secara tepat waktu (hanya sebanyak 214 koperasi yang telah berRAT secara tepat waktu dari total sebanyak 644 koperasi aktif)

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendampingan RAT kepada koperasi secara berkelanjutan;
2. Melaksanakan kunjungan lapangan dan pembinaan koperasi secara berkelanjutan.

❖ **Sasaran Strategis 3** : Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro

Sasaran Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro Dengan indikator Prosentase Usaha Mikro naik kelas capaian kinerja tahun ini sebesar nihil dikarenakan direkap diakhir periode (belum diketahui tercapai atau tidaknya). Tercapainya indikator ini didukung dengan adanya:

1. Terlaksananya fasilitasi pendampingan NIB
2. Terlaksananya updating data usaha mikro
3. a. Terlaksananya pelatihan pemasaran online
b. Tersedianya *platform marketplace* sebagai wadah promosi dan penjualan produk usaha mikro

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa:

1. Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk berizin usaha (NIB) sebanyak 105 telah terfasilitasi
2. Keterbatasan kemampuan pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi digital dan literasi digital

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut:

1. Melaksanakan fasilitasi pendampingan NIB
2. Melaksanakan pengadaan platform marketplace sebagai wadah promosi dan penjualan produk usaha mikro sebanyak 1 aplikasi Lumajang Tulen

❖ **Sasaran Strategis 4** : Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan

Sasaran Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan dengan indikator Nilai PDRB sektor Perdagangan capaian kinerja triwulan ini sebesar nihil dikarenakan masih menunggu

perhitungan BPS, realisasi akan diketahui di tahun berikutnya. Hal yang menunjang capaian kinerja di sasaran ini antara lain:

1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi kondisi pasar daerah untuk mengetahui tingkat kerusakan dan rencana rehabilitasi maupun pemeliharaan di pasar daerah
2. Terlaksananya promosi dagang tingkat Kabupaten / pasar ramadhan sebanyak 1 fasilitasi dan promosi tingkat Provinsi sebanyak 1 fasilitasi
3. a. Terlaksananya pemantauan harga bahan pokok 16 pasar daerah: Pasar Ranuyoso, Pasar Klakah, Pasar Randuagung, Pasar Yosowilangun, Pasar Kunir, Pasar Sukodono, Pasar Dawuhan, Pasar Senduro, Pasar Baru Lumajang, Pasar Klojen, Pasar MKS, Pasar Pasirian, Pasar Candipuro, Pasar Pronojiwo, Pasar Nogosari, Pasar Tempeh
b. Terlaksananya Pembentukan warung TIPD di 4 pasar daerah
c. Terlaksananya operasi pasar selama 17 kali yang tersebar di 13 titik lokasi untuk menanggulangi adanya kenaikan harga bahan pokok

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa:

1. Sarana dan prasarana kurang memadai dapat menghambat aktifitas perdagangan di pasar daerah (dibuktikan dengan grafik kondisi pasar daerah)
2. Ketidakstabilan harga mempengaruhi volume perdagangan (berdasarkan data BPS, nilai IPH minggu ke-4 Juni 2025 sebesar 1,06%, dibawah batas maksimal 2,56%)

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut:

1. Melaksanakan perencanaan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar daerah;
2. Melaksanakan fasilitasi promosi dagang;
3. Melaksanakan kegiatan operasi pasar.

3.2.2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terciptanya Ekonomi Wilayah yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Industri	Nilai PDRB sektor Industri	menunggu data BPS	6	Belum diketahui
	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	Prosentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri	direkap diakhir periode	6	Belum diketahui
2	Meningkatnya investasi inklusif	Nilai Investasi	15	25	(10)
	Meningkatnya kualitas Koperasi	Persentase koperasi yang taat akan peraturan perundang - undangan	71	36	35
	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Prosentase Usaha Mikro naik kelas	direkap diakhir periode	5	Belum diketahui
	Meningkatnya Nilai PDRB sektor Perdagangan	Nilai PDRB sektor Perdagangan	direkap diakhir periode	7	Belum diketahui

Pada Tabel 3.3 ditunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mendukung kinerja tujuan Terciptanya Ekonomi Wilayah yang Bertumpu pada Sektor Pertanian, sasaran Meningkatkan pertumbuhan sektor industri dan Industri, Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro, Meningkatkan Nilai PDRB sektor Perdagangan belum diketahui efisiensinya dikarenakan capaian kinerjanya belum diketahui (direkap diakhir periode dan menunggu perhitungan BPS). Sedangkan anggaran yang digunakan pada tujuan Meningkatkan investasi inklusif efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Nilai Investasi tergolong rendah. Diketahui bahwa capaian kinerja

yang diperoleh sebesar 15%, sedangkan capaian anggaran telah mencapai 25%. Perbandingan antara output dan penggunaan anggaran ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya masih belum optimal. Hal ini diperkuat dengan identifikasi adanya inefisiensi anggaran sebesar -10%, yang menandakan bahwa belanja yang telah dilakukan belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang proporsional terhadap pencapaian tujuan investasi, dikarenakan capaian 15% merupakan capaian triwulan I, sedangkan capaian sampai dengan triwulan II akan release tanggal 10 Juli 2025.

Sasaran Meningkatnya kualitas Koperasi pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan capaian kinerja tercatat sebesar 71%, sementara realisasi anggaran baru mencapai 36%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan dengan efisien, menghasilkan capaian kinerja hampir dua kali lipat dari anggaran yang digunakan, dengan efisiensi anggaran sebesar 35%. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan berhasil memaksimalkan sumber daya yang ada, memberikan hasil optimal dalam peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro, sasaran Meningkatnya Nilai PDRB sektor Perdagangan belum dapat dihitung tingkat efisiensi anggarannya dikarenakan capaian kinerja masih belum diketahui.

Efisiensi sumber daya selain dilihat dari anggarannya juga dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang kinerja tersebut. Jika dilihat pada dokumen analisa jabatan dan peta jabatan, total kebutuhan jabatan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 89 orang, kondisi saat ini jumlah personil ASN yang ada dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 sebanyak 80, dengan persentase pemenuhan kebutuhan jabatan sebesar 89,88%. Meskipun demikian, keberadaan tenaga kontrak bulanan sebanyak 159 orang juga merupakan bagian dari dukungan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. Hal ini jika diperbandingkan

dengan rata- rata capaian kinerja tahun ini yang tercapai, maka dapat dikatakan bahwa dengan jumlah SDM yang sudah mampu untuk memenuhi target kinerjanya atau dengan kata lain sudah efisien.

Sedangkan untuk sumberdaya sarana dan prasarana, kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang ada saat ini dengan kondisi baik 0%, rusak 75% dan rusak berat 25%. Jika diperbandingkan antara rata – rata capaian kinerja tahun 2025 dengan kondisi sumber daya sarana dan prasarana yang sebagian besar kondisinya rusak maka dapat dikatakan bahwa sumber daya sarana dan prasarana saat ini masih belum efisien sehingga perlu dilakukan penambahan atau penggantian khususnya pada perangkat kerja seperti komputer, laptop, dan printer karena sebagian besar perangkat kerja memiliki usia lebih dari 10 tahun serta dibutuhkan rehabilitasi pada pasar daerah bahkan revitalisasi pada pasar – pasar daerah yang sudah memiliki umur lebih dari 25 tahun seperti Pasar Tempeh dan Pasar Randuagung.

3.2.3. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan ditunjang oleh program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja tersebut. Adapun program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Terciptanya Ekonomi Wilayah yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Industri

Indikator : Nilai PDRB sektor Industri dengan target 5.984,04 milyar, realisasi belum diketahui dikarenakan menunggu perhitungan BPS. Hal yang mendukung sasaran strategis ini antara lain :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan sektor industri

Sasaran ini diukur dengan indikator Prosentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri ditunjang oleh 3 program yaitu:

1) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, dengan indikator Nilai produksi industri. Target untuk indikator ini adalah

Rp 1.491.388.500.000 dan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 483.624.842.126 sehingga capaiannya 32% tergolong sangat rendah karena akan direkap sampai dengan akhir periode. Indikator program ini dapat terealisasi karena

1. Terlaksananya pendampingan inputing SIINAS sebanyak 1 fasilitasi

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah industri dalam rencana pembangunan kabupaten yang difasilitasi dengan target 400 IKM dan realisasi 95 IKM sehingga capaiannya 24%. Capaian masih sangat rendah dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan indikator Prosentase jumlah izin yang diterbitkan. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah rekomendasi IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Yang Diterbitkan dengan target 2 dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga capaiannya 50%. Hal ini belum terealisasi maksimal karena akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya..

3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan indikator Prosentase jumlah IKM yang

mengupdate data di SIINAS. Target untuk indikator ini adalah 61,45% dan realisasi 0% sehingga capaiannya 0%. Indikator program ini belum terealisasi dikarenakan Sesuai Permenperin Nomor 2 Tahun 2019 tentang tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, data lain, informasi industri, dan informasi lain melalui sistem informasi industri nasional tentang pasal 4 ayat 2, bahwa perusahaan industri menyampaikan Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala sebanyak 2 (dua) kali setiap tahun. Data tersebut merupakan realisasi semester 1 yang dilaporkan di semester II karena sistem bisa diakses pada bulan Agustus/September, sedangkan semester II di akhir Februari 2026.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah dokumen informasi industri yang tersedia dengan target 2 dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga capaiannya 50%. Hal ini belum tercapai maksimal karena pelaksanaan pada Triwulan III dan IV.

Dari penjabaran diatas bisa terlihat jika program – program yang menunjang sasaran Meningkatnya pertumbuhan sektor industri mempunyai capaian kinerja yang belum teridentifikasi dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya, maka capaian kinerja sasaran tersebut juga belum diketahui. Hal ini membuktikan bahwa program tersebut memang memiliki keterhubungan atau mendukung secara langsung kinerja diatasnya.

2. Tujuan 2 : Meningkatnya investasi inklusif

Indikator : Nilai Investasi dengan target 1.282.684,40 juta, realisasi 193.900 juta dengan capaian sebesar 15%. Tergolong

sangat rendah karena capaian tersebut hanya berdasar realisasi triwulan I. Sedangkan realisasi triwulan II akan terbit tanggal 10 Juli 2025 sesuai data dari DPMPTSP Provinsi Jawa Timur. Tujuan ini didukung dengan sasaran strategis :

a. Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas Koperasi

Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase koperasi yang taat akan peraturan perundang - undangan ditunjang oleh 4 program yaitu:

- 1) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, dengan indikator persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Target untuk indikator ini adalah 54,27% dan realisasi 0,8% sehingga capaiannya 2%. Indikator program ini terealisasi sangat rendah karena :
 1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman Pengurus, Pengawas dan Anggota Koperasi terkait peraturan perundang-undangan.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator jumlah koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam yang di periksa dan diawasi dengan target 100 koperasi dan realisasi sebesar 6 koperasi sehingga capaiannya 6%. Tergolong sangat rendah karena akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
- 2) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan indikator Persentase koperasi sehat dan cukup sehat. Target untuk indikator ini adalah 56,67% dan realisasi 96,05% sehingga capaiannya 170%. Indikator program ini tergolong sangat tinggi dikarenakan adanya tambahan dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang harus dilakukan penilaian kesehatan juga. Pelaksanaan kegiatan akan dilanjutkan pada triwulan berikutnya.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah koperasi simpan pinjam yang sehat dan cukup sehat dengan target 68 koperasi dan realisasi 73 koperasi sehingga capaiannya 107%.
- Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian dengan indikator Persentase koperasi yang mendapatkan pelatihan perkoperasian. Target untuk indikator ini adalah 40,74% dan realisasi 0% sehingga capaiannya 0%. Indikator program ini dapat belum terealisasi karena akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan perkoperasian dengan target 220 orang dan realisasi 0 orang sehingga capaiannya 0%. Hal ini belum terealisasi karena akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

- 3) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi dengan indikator Persentase koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan. Target untuk indikator ini adalah 22,96% dan realisasi 0% sehingga capaiannya 0%. Indikator program ini belum dapat terealisasi karena terlaksananya bantuan permodalan bagi koperasi akan dilaksanakan pada triwulan III.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan

indikator jumlah pemberdayaan SDM koperasi dengan target 124 orang dan realisasi 0 orang sehingga capaiannya 0%. Hal ini belum tercapai karena akan dijadwalkan pada triwulan berikutnya.

Dari penjabaran diatas bisa terlihat jika program-program yang menunjang meningkatnya kualitas Koperasi mempunyai capaian kinerja yang sebagian besar belum terealisasi, maka capaian kinerja sasaran tersebut juga belum diketahui penurunan atau peningkatannya. Hal ini membuktikan bahwa program tersebut memang memiliki keterhubungan atau mendukung secara langsung kinerja diatasnya.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro

Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase Usaha Mikro yang naik kelas yang ditunjang oleh 2 program yaitu:

- 1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan indicator capaian program adalah Persentase Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) yang Diberdayakan. Persentase ini dihitung berdasarkan Jumlah Usaha Mikro Yang difasilitasi usahanya dibagi jumlah usaha mikro yang ada di Kabupaten Lumajang. Target untuk indikator ini sebesar 0,9% dan realisasi sebesar 0,6% sehingga capaiannya 71%. Indikator program ini dapat terealisasi meskipun tergolong sedang karena adanya rekap akan dilaksanakan sampai akhir periode.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan indikator Jumlah Usaha Mikro Yang difasilitasi usahanya dengan target 471 Usaha mikro dan realisasi 333 usaha mikro sehingga capaiannya 71%. Indikator program ini dapat terealisasi

karena kegiatan pendataan usaha mikro, pendampingan perolehan NIB bagi UMKM yang telah dilakukan.

- 2) Program Program Pengembangan UMKM dengan indikator Prosentase pengembangan usaha mikro. Target untuk indikator ini adalah 0,5% dan realisasi 0% sehingga capaiannya 0%. Indikator program ini belum dapat terealisasi karena rekap akan dilaksanakan diakhir periode.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan target 10 unit usaha dan realisasi 0 unit usaha sehingga capaiannya 0%. Hal ini tidak tercapai karena akan direkap diakhir periode.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan

Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase Usaha Mikro yang naik kelas yang ditunjang oleh enam program yaitu:

- 1) Program perizinan dan pendaftaran perusahaan dengan indikator capaian program adalah Persentase perusahaan yang mendapat rekomendasi izin usaha. Persentase ini dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi izin usaha /jumlah pengajuan izin usaha. Target untuk indikator ini adalah 80% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 125%. Indikator program ini terealisasi karena terdapat 3 pengajuan rekomendasi izin usaha.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan tiga kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang dengan indikator Persentase peningkatan jumlah rekomendasi TDG dengan target 100% dan realisasi 100 % sehingga capaiannya 100%. Indikator kegiatan ini dapat terealisasi dengan maksimal karena pelaku usaha untuk melakukan pengajuan ijin usaha TDG sebanyak 2 dokumen.

- Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat dengan target 50% dan terealisasi 100 terealisasi karena terdapat pelaku usaha yang mengajukan ijin Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat sebanyak 1 dokumen, namun direkomendasikan untuk melakukan pengajuan ulang karena terdapat berkas yang kurang sesuai.
 - Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi. Target 2 pelaku usaha dan realisasi 0 atau capaian sebesar 0%. Kegiatan tersebut tidak terealisasi karena belum ada pelaku usaha yang dapat difasilitasi dikarenakan masih belum ada pelaku usaha yang mengajukan ijin.
- 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator adalah Prosentase Jumlah Pasar sesuai standar SNI. Indikator tersebut dihitung berdasarkan Jumlah Pasar Berstandar SNI dibandingkan jumlah total pasar daerah Kabupaten Lumajang. Target program adalah 3,45 % dan realisasi sebesar 0% atau dengan kata lain capaiannya sebesar 0%. Program tersebut terealisasi 0% dikarenakan masih dalam proses tahap persiapan perencanaan pekerjaan.
- Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan dua kegiatan yaitu :
- Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun/ direhab. Target tahun 2025 adalah 8 unit dan terealisasi sebanyak 0 unit dengan kata lain capain yang dihasilkan sebesar 0%. Realiasasi masih nihil

target dikarenakan adanya pergeseran anggaran dan masih dalam persiapan pengadaan.

- Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dengan indikator Prosentase pembinaan terhadap pedagang yang dihitung berdasarkan jumlah pedagang yang dibina dibagi total jumlah pedagang pada pasar daerah yang dikelola diskopindag. Target sebesar 11 % dan terealisasi sebesar 1,42% atau capaian kegiatan adalah 13%. Indikator kegiatan ini teralisasi sangat rendah karena sosialisasi tidak jadi dilaksanakan secara tatap muka dan diubah menjadi pemasangan banner di seluruh pasar daerah. Isi banner mengenai perda no 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat menjangkau seluruh pedagang pasar.

3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan indikator Persentase pengendalian stabilisasi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dihitung berdasarkan standard deviasi harga tahun n dibagi rata-rata harga tahun n. Target tahun 2025 adalah 80 % dan terealisasi 77% atau dengan kata lain capaiannya sebesar 96%. Indikator program ini belum tercapai maksimal karena adanya fluktuasi/ketidakstabilan harga pada beberapa komoditas bahan pokok yaitu cabai rawit dan cabai merah.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan dua kegiatan yaitu :

- Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah harga barang kebutuhan pokok yang dikendalikan dengan target 13 barang. Realisasi tahun 2025 adalah sebanyak 13 barang atau capaiannya 100%. Indikator kegiatan ini dapat terlaksana

karena adanya petugas pemantau harga, adanya hasil inputing dan rekap dari 16 pasar di Kabupaten Lumajang, analisis fluktuasi harga bapokting dan terdapatnya komunikasi antara OPD dengan distributor kebutuhan barang pokok.

- Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah obyek pengawasan pupuk dan pestisida yang dihitung berdasarkan jumlah kios dan distributor yang diawasi tahun N. Target tahun 2025 adalah 168 kios dan terealisasi sebanyak 77 kios dengan capaian 46%. Capaian indikator kegiatan belum 100% karena kegiatan masih akan dilaksanakan sampai akhir tahun. Selain itu hambatan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu banyaknya kios yang tutup ketika pelaksanaan pengawasan.

4) Program Pengembangan Ekspor dengan dua indikator yaitu nilai ekspor dan nilai perdagangan antar daerah. Target nilai ekspor adalah Rp 1.175.296.332.815,85 dan realisasi Rp 174.682.004.400 sehingga capaiannya 15%. Sedangkan target nilai perdagangan antar daerah adalah Rp 5.924.944.703.361 dan realisasi Rp 129.614.313.068 sehingga capaiannya 2%. Indikator program ini terealisasi namun belum maksimal karena akan direkap sampai akhir periode. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan aktivitas usahanya, belum adanya terkait regulasi daerah terkait pelaporan usaha perdagangan.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan yaitu :

- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan target omset dagang senilai Rp 450.000.000,- dan realisasi Rp 1.425.000,- sehingga

capaiannya 0,3%. Capaian merupakan hasil dari kegiatan pameran Dekranasda. Capaian rendah dikarenakan pelaksanaan promosi dagang/pameran lainnya pada triwulan berikutnya.

- 5) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan indikator tingkat kepatuhan WTU (Wajib Tera Ulang) yang dihitung berdasarkan jumlah WTU patuh dibanding jumlah potensi WTU. Target tingkat kepatuhan WTU adalah 80 % dan realisasi 35% sehingga capaiannya 41%. Indikator program ini dapat terealisasi sangat rendah karena akan direkap sampai akhir periode. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan yaitu :

- Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, dengan target jumlah WTU yang melakukan tera, tera ulang sebanyak 2.067 WTU dan realisasi 891 WTU sehingga capaiannya 43%. Indikator kegiatan ini dapat tercapai sangat rendah karena rendahnya kesadaran WTU tentang metrologi legal terutama terkait UTTP yang dimiliki menyebabkan rendahnya partisipasi mengajukan tera, tera ulang UTTP.

- 6) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan indikator prosentase pertumbuhan nilai perdagangan dalam daerah. Target pertumbuhan nilai perdagangan dalam daerah adalah sebesar 5 % dan realisasi sebesar 0 % sehingga capaiannya 0%. Tidak terpenuhinya target program karena akan direkap diakhir periode. Hambatan dari pencapaian program ini karena kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan aktivitas usahanya di aplikasi SI DILAN.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan yaitu :

- Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan target Nilai perdagangan dalam daerah sebesar

Rp 8.604.645.491.050,00 dan realisasi Rp 1.507.730.516.560 sehingga capaiannya 17,52%. Indikator kegiatan ini capaiannya sangat rendah dikarenakan kegiatan yang terlaksananya hanya Pasar Ramadhan dan pelaksanaan promosi yang lainnya pada triwulan berikutnya.

3.2.4 Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan tahun 2025 adalah sebesar Rp 27.805.047.633,- dengan realisasi anggaran per 30 Juni 2025 tercatat sebesar Rp 6.835.975.140,- atau sebesar 25%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran 2025 (s.d 30 Juni 2025)

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.076.486.014	5.059.823.310	42
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	41.000.000	8.000.000	20
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	54.888.000	-	0
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	101.563.000	-	0
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.888.172.939	10.200.000	1
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.578.850.965	157.853.500	4
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	82.706.300	1.800.000	2
8	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	62.200.000	525.000	1
9	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	6.532.742.965	1.211.837.250	19
10	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	987.614.940	40.380.000	4
11	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	435.942.350	54.076.133	12
12	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	543.218.610	116.451.772	21
13	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	286.850.000	110.869.000	39
14	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.116.055.550	63.709.175	6
15	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	8.050.000	450.000	6
16	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	8.706.000	-	0
	TOTAL	27.805.047.633	6.835.975.140,00	25

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan analisis capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2025, Tujuan rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan pada tahun 2025 adalah Terciptanya Ekonomi Wilayah yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Industri dan Meningkatnya investasi inklusif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan menetapkan empat sasaran kinerja antara lain :

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Total	Capaian (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.	Terciptanya Ekonomi Wilayah yang bertumpu pada Sektor Pertanian dan Industri	Nilai PDRB sektor Industri	5.984,04 milyar	-	-	-	-	Menunggu data BPS	belum diketahui
2.	Meningkatnya investasi inklusif	Nilai Investasi	1.282.684,40 juta	193.900 juta	-	-	-	193.900 juta	15,12
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Total	Capaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	Prosentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri	3,63%	-	-	-	-	direkap diakhir periode	belum diketahui
2.	Meningkatnya kualitas Koperasi	Persentase koperasi yang taat akan peraturan perundang – undangan	40,7%	25	4	-	-	29	71
3.	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Prosentase Usaha Mikro naik kelas	0,01%	-	-	-	-	direkap diakhir periode	belum diketahui
4.	Meningkatnya Nilai PDRB sektor Perdagangan	Nilai PDRB sektor Perdagangan	4.045,54 milyar	-	-	-	3.969,54	Menunggu data BPS	belum diketahui

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

❖ Tujuan :

1. Indikator kinerja tujuan Terciptanya Ekonomi Wilayah yang bertumpu pada Sektor Pertanian dan Industri dengan indikator Nilai PDRB sektor Industri terealisasi nihil dengan capaian kinerja 0%, dikarenakan menunggu data BPS.

2. Indikator kinerja tujuan Meningkatnya Investasi Inklusif terealisasi sebesar nihil dengan capaian kinerja 15,12%, capaian masih tergolong sangat rendah dikarenakan merupakan realisasi di triwulan I, sedangkan laporan triwulan II release tanggal 10 Juli 2025 (sumber data DPMPTSP Provinsi Jawa Timur : <https://dpmptsp.jatimprov.go.id/triwulan/#>).

❖ Sasaran Strategis

1. Indikator kinerja dengan capaian realisasi $\geq 100\%$ sebanyak 0 indikator
2. Indikator kinerja dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator, yaitu sasaran Meningkatnya Kualitas Koperasi sebesar 29% sehingga capaiannya 71%. Menunjukkan kurangnya kesadaran koperasi dalam melaksanakan RAT secara tepat waktu.
3. Indikator kinerja yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 3 indikator yaitu sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor industri, meningkatnya kualitas usaha mikro, meningkatnya Nilai PDRB sektor Perdagangan dikarenakan menunggu data dari BPS.

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai sampai dengan Triwulan II tahun 2025, maka tindak lanjut dan upaya yang dapat dilaksanakan sehingga dapat mempertahankan dan / atau meningkatkan kinerja, sebagai berikut :

Sektor Koperasi :

1. Melaksanakan pengawasan koperasi yang belum ber-RAT secara berkelanjutan
2. Melaksanakan pendampingan RAT
3. Melaksanakan bimbingan dan pelatihan bagi pengurus koperasi
4. Melaksanakan penyaluran bantuan modal koperasi

Sektor Usaha Mikro :

1. Melaksanakan penyaluran bantuan kemasan
2. Melaksanakan kurasi UMKM tingkat Kabupaten
3. Melaksanakan fasilitasi *comunal branding*
4. Melaksanakan pelatihan peningkatan keterampilan bagi usaha mikro

Sektor Industri :

1. Melaksanakan monitoring P3DN dan verifikasi PDN secara berkelanjutan
2. Melaksanakan penyaluran bantuan kemasan
3. Melaksanakan pendampingan sertifikasi TKDN bagi IKM
4. Melaksanakan pendampingan penyesuaian perijinan dasar sebagai pemenuhan komitmen IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI yang terintegrasi dengan SIINAS
5. Melaksanakan pendampingan pelaporan data informasi industri
6. Melaksanakan pengawasan Izin Usaha Industri
7. Melaksanakan pelatihan

Sektor Perdagangan :

1. Melaksanakan perencanaan rehabilitasi pasar dan pemeliharaan pasar
2. Melaksanakan rehabilitasi pasar dan pemeliharaan pasar
3. Melaksanakan promosi produk
4. Melaksanakan pengendalian harga dan stok pada pelaku usaha distribusi dan pasar daerah
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi
6. Melaksanakan pendataan gudang (TDG)
7. Melaksanakan pelayanan tera, tera ulang secara berkelanjutan

LAMPIRAN

❖ DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD RIDHA, S.Sos., M.Si.

Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Jabatan : Pj. BUPATI LUMAJANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,


INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si
BUPATI LUMAJANG

Pihak Pertama,


MUHAMMAD RIDHA, S.Sos., M.Si.
NIP. 19731118 199303 1 002
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LUMAJANG

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	1	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri	3,63%
2	Meningkatnya kualitas Koperasi	2	Persentase koperasi yang taat akan peraturan perundang - undangan	40,71%
3	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	3	Persentase Usaha Mikro naik kelas	0,01 %
4	Meningkatnya Nilai PDRB sektor Perdagangan	4	Nilai PDRB sektor Perdagangan	4.045,54

	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	12.076.486.014	DAU
2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	41.000.000	DAU
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp	54.888.000	DAU
4	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp	101.563.000	DAU dan DIF
5	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp	1.888.172.939	DAU,DIF dan Pokir
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	3.578.850.965	DAU,DIF dan Pokir
7	Program Pengembangan UMKM	Rp	82.706.300	DAU
8	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp	1.116.055.550	DAU ,DIF dan DBHCHT
9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp	8.050.000	DAU
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	8.706.000	DAU
11	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp	62.200.000	DAU
12	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	6.532.742.965	DAU dan DIF
13	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp.	987.614.940	DAU dan DIF
14	Program Pengembangan Ekspor	Rp.	435.942.350	DAU dan DIF

	Program	Anggaran	Keterangan
15	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp. 543.218.610	DAU dan DIF
16	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 286.850.000	DAU dan DIF
	JUMLAH	Rp 27.805.047.633,00	

PS. BUPATI LUMAJANG


INDAR WAHYUNI, S.H., M.Si

Lumajang, 10 Januari 2025
 KEPALA DINAS KOPERASI,
 USAHA KECIL, MENENGAH,
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 LUMAJANG


MUHAMMAD RIDHA, S.Sos., M.Si
 NIP. 19731118 199303 1 002

❖ **MATRIK TUJUAN, SASARAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2025	TARGET P - RENJA 2025	CATATAN
Terciptanya Ekonomi Wilayah yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Industri	Nilai PDRB sektor Industri	Milyar Rupiah	Data BPS	5.699,08	5.671,95	
Meningkatnya investasi inklusif	Nilai Investasi	Rp. Juta	Data DPMPSTP	1.191.064,10	1.574.938,67	

Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2025	TARGET P RENJA 2025	CATATAN
Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	Prosentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri	%	(Nilai produksi industri tahun N - Nilai produksi tahun sebelumnya (N-1))/ Nilai produksi tahun sebelumnya (N-1) x 100%	3,13	2,5	
Meningkatnya kualitas Koperasi	Persentase koperasi yang taat akan peraturan perundang – undangan	%	Jumlah Koperasi yang RAT / Jumlah total Koperasi x 100%	40,41	40,38	
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Prosentase Usaha Mikro naik kelas	%	Jumlah UM naik Kelas / Jumlah UM x 100%	0,01%	0,01%	
Meningkatnya Nilai PDRB sektor Perdagangan	Nilai PDRB sektor Perdagangan	Milyar Rupiah	Nilai PDRB sektor Perdagangan	3.834,55	3.852,89	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Terlaksananya pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase izin usaha simpan pinjam koperasi	$x = \frac{(\text{jumlah izin usaha simpan pinjam tahun } N)}{(\text{jumlah izin usaha simpan pinjam tahun } N-1)} \times 100\%$	1.437.250.000		kab. Lumajang	0	%	0	DAU
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi	$x = \text{jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam}$			kab. Lumajang	0	koperasi	0	DAU
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	$x = \text{jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam, kantor cabang}$			kab. Lumajang	0	koperasi	0	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				pembinaan terhadap koperasi yang mengajukan izin usaha simpan pinjam	1	kab. Lumajang	0	koperasi	0	DAU
				fasilitasi akses pembiayaan	2	kab. Lumajang	0	koperasi	0	DAU
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi	x =jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas koperasi			kab. Lumajang	0	koperasi	0	DAU
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	x =jumlah penerbitan izin usaha kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas koperasi			kab. Lumajang	0	koperasi	0	DAU
				fasilitasi pembukaan kantor cabang	1	kab. Lumajang	0	koperasi	0	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan koperasi	persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	$x = \frac{(\text{jumlah pengawasan dan pemeriksaan koperasi})}{(\text{jumlah seluruh koperasi})} \times 100\%$			kab. Lumajang	54,27	%	41.000.000	DAU
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi	Jumlah koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam yang diperiksa dan diawasi	$x = \text{jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan}$			kab. Lumajang	100	koperasi	41.000.000	DAU
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	$x = \text{jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan}$			kab. Lumajang	100	unit usaha	25.000.000	DAU
				pengawasan koperasi	1	kab. Lumajang	100	koperasi	20.000.000	DAU
				mediasi	2	kab. Lumajang	5	koperasi	5.000.000	DAU
				monev self declare koperasi	3	kab. Lumajang	0	koperasi	0	DAU
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	$x = \text{jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan}$			kab. Lumajang	300	unit usaha	16.000.000	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				pendampingan RAT	1	kab. Lumajang	300	koperasi	16.000.000	DAU
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	$x = \frac{(\text{jumlah koperasi sehat dan cukup sehat})}{(\text{jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya})} \times 100\%$			kab. Lumajang	56,67	%	55.000.000	DAU
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang sehat dan cukup sehat	$x = \text{Jumlah koperasi simpan pinjam yang sehat dan cukup sehat}$			kab. Lumajang	68	koperasi	55.000.000	DAU
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	$x = \text{jumlah koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan}$			kab. Lumajang	120	unit usaha	55.000.000	DAU
				Kunjungan lapangan penilaian kesehatan koperasi	1	kab. Lumajang	120	koperasi	15.000.000	DAU
				Gathering Koperasi / pemberian penghargaan pada koperasi sehat	2	kab. Lumajang	1	kegiatan	40.000.000	DAU
				rapat koordinasi persiapan penilaian	3	kab. Lumajang	0	kegiatan	0	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Terlaksananya pendidikan dan latihan perkoperasian	persentase koperasi yang mendapatkan pelatihan perkoperasian	$x = (\text{jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian}) / (\text{jumlah seluruh koperasi}) \times 100\%$			kab. Lumajang	40,74	%	105.000.000	DAU
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan perkoperasian	$x = \text{jumlah SDM yang mengikuti pelatihan perkoperasian}$			kab. Lumajang	220	orang	105.000.000	DAU
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	$x = \text{jumlah SDM koperasi yang memahami pengetahuan perkoperasian}$			kab. Lumajang	110	orang	105.000.000	DAU
				pelatihan kewirausahaan dan bantuan kemas	1	kab. Lumajang	60	orang	60.000.000	DAU +DIF
				Bimtek administrasi keuangan bagi koperasi KSP/USP (SKKNI)	2	kab. Lumajang	0	koperasi	0	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				Bimtek penyusunan laporan pertanggungjawaban dan tata cara RAT bagi anggota, pengurus dan pengawas koperasi (teori dan simulasi)	3	kab. Lumajang	50	orang	45.000.000	DAU
				Bimtek administrasi keuangan bagi anggota, pengurus dan pengawas koperasi	4	kab. Lumajang	0	orang	0	DAU
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Terlaksananya pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan	$x = (\text{jumlah pemberdayaan dan perlindungan koperasi}) / (\text{jumlah seluruh koperasi}) \times 100\%$			kab. Lumajang	22,96	%	1.236.250.000	DAU
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan dan perlindungan koperasi	jumlah pemberdayaan SDM koperasi	$x = \text{jumlah pemberdayaan dan perlindungan koperasi}$			kab. Lumajang	124	orang	1.236.250.000	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	x =jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah akses pasar akses akses pembiayaan, penguatan kelembagaan penataan manajemen standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi			kab. Lumajang	124	unit usaha	1.236.250.000	DAU
				Honorarium TKB	1	kab. Lumajang	2	orang	40.800.000	DAU
				kajian review perda pemberdayaan koperasi dan usaha mikro	2	kab. Lumajang	1	dokumen	75.000.000	DIF
				monitoring, evaluasi dan revitalisasi koperasi tidak aktif	3	kab. Lumajang	5	koperasi	15.000.000	
				sosialisasi akses pembiayaan koperasi	4	kab. Lumajang	60	koperasi	45.000.000	
				penguatan kelembagaan KUD	5	kab. Lumajang	5	koperasi	15.000.000	
				Pameran Usaha Koperasi	6	kab. Lumajang	50	koperasi	60.000.000	
				Identifikasi usaha koperasi dan usaha anggotanya	7	kab. Lumajang	55	unit usaha	25.000.000	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				verlap dan monev hibah	8	kab. Lumajang	4	koperasi	9.450.000	DAU
				revitalisasi koperasi pasar	9	kab. Lumajang	4	koperasi	6.000.000	DAU
				Belanja Hibah Uang (Pokir)	10	kab. Lumajang	4	koperasi	945.000.000	DAU
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya UMKM yang diberdayakan	Persentase Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) yang Diberdayakan	$x = \frac{\text{Jumlah Usaha Mikro Yang difasilitasi usahanya}}{\text{total usaha mikro di kab.lumajang}} \times 100 \%$		1	Lumajang	0,9	%	9.420.515.366	DAU
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro Yang difasilitasi usahanya	Jumlah Usaha Mikro Yang difasilitasi usahanya			Lumajang	471	Usaha Mikro	9.420.515.366	DAU
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terfasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan			Lumajang	240	Unit Usaha	220.590.000	DAU
				Honor Tenaga Kerja Bulanan	1	Lumajang	8	Orang	163.200.000	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				Pendampingan Perolehan NIB bagi Usaha Mikro	2	21 Kecamatan	240	Unit Usaha	19.190.000	DAU
				Pendataan Usaha Mikro	3	21 Kecamatan	500	Usaha Mikro	18.200.000	DAU
				Sosialisasi Si Dilan	5	Lumajang	40	Usaha Mikro	20.000.000	DAU
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha			Lumajang	151	Unit Usaha	8.754.925.366	DAU
				Pengembangan Aplikasi Lumajang Tulen	1	Lumajang	1	aplikasi	50.000.000	DAU+DIF
				Sosialisasi Lumajang Tulen	2	Lumajang	50	UM	12.700.000	DAU+DIF
				Pemberian Bantuan permodalan Pokir	3	Lumajang	121	Unit Usaha	8.546.450.000	DAU
				Verlap dan Monev bantuan permodalan	4	Lumajang	121	Unit Usaha	75.775.366	DAU
				Gebyar UMKM	5	Lumajang	30	Usaha Mikro	70.000.000	DAU
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	x=Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Kompetensi Usaha Mikro dan Kewirausahaan			Lumajang	80	Orang	445.000.000	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Pelatihan										
				Pelatihan pemasaran online	1	Lumajang	30	Orang	60.000.000	DAU+DIF
				Bantuan Mesin dan Peralatan produksi kue	2	Desa Jatiroto Kec. Jatiroto	10	Orang	75.000.000	DIF
				Bantuan Mesin dan Peralatan produksi menjahit	3	Desa Salak Kecamatan Randuagung	10	Orang	100.000.000	DIF
				Pelatihan Peningkatan pengetahuan dan wawasan manajemen dan keuangan usaha	4	Lumajang	30	Orang	0	DAU
				Pelatihan Pengrajin Dompot dan Pengadaan 1 Set Alat Produksi (Pelatihan Pemasaran)		Dusun Joglosari RT.008 RW.010 Desa Tambahrejo	15	Perijinan	30.000.000	DAU
				Pelatihan Batik bagi UMKM/Kelompok UPPKS		Desa Gucialit	30	Orang	30.000.000	DAU
				Bantuan Peralatan UMKM (Kripik Singkong)		Desa Sawaran Lor	1	Paket	30.000.000	DAU
				Bantuan UMKM Tahu (Wajan)		Desa Kunir Kidul	50	Pcs	30.000.000	DAU
				Pelatihan Digital Marketing pada UMKM Produksi Roti		Desa Banjarwaru	1	Paket	30.000.000	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				Pelatihan dan Pengadaan Alat Pembuatan Keripik (Pengadaan Usaha macam-macam Keripik) (alat produksi keripik)		Desa Buwek	1	Paket	30.000.000	DAU
				Pelatihan Kader PKK (Pemasaran UMKM)		Desa Jatisari	2	Paket	30.000.000	DAU
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatkan Pengembangan UMKM	Persentase pengembangan usaha mikro	x=Jumlah Usaha Mikro yang mengalami peningkatan omset / jumlah usaha mikro x 100%			Lumajang	0,5	%	86.456.500	DAU
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang mempunyai Omset antara 1-2 Milyar	x=Jumlah Usaha Mikro Yang Mempunyai Omset antara 1-2 Milyar			Lumajang	10	Usaha Mikro	86.456.500	DAU
Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	x=Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			Lumajang	90	Usaha Mikro	86.456.500	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				Sosialisasi dan Pendampingan Prosedur Ekspor bagi usaha Mikro	1	Lumajang	20	Usaha Mikro	15.194.500	DAU
				Kurasi UMKM	2	Lumajang	50	Usaha Mikro	32.088.000	DAU
				Fasilitasi Comunal Branding Kopi	3	Lumajang	20	Usaha Mikro	10.000.000	DAU
				Pendataan dan Pendampingan Perizinan PKL	4	Lumajang, Pasi- rian, Pronojiwo, Senduro	4	Kecamatan	29.174.000	DAU
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh izin usaha	Persentase perusahaan yang mendapat rekomendasi izin usaha	$x = \frac{\text{jumlah rekomendasi izin usaha}}{\text{jumlah pengajuan izin usaha}} \times 100\%$			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	80	%	62.200.000	
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	meningkatkan jumlah rekomendasi dari TDG	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi dari TDG	$x = \frac{\text{Jumlah dokumen rekomendasi dari TDG Tahun N}}{\text{pengajuan TDG yang masuk}} \times 100\%$			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100	%	38.100.000	
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	$x = \text{Jumlah dokumen rekomendasi dari TDG Tahun N}$			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	10	dokumen	38.100.000	
				Fasilitasi Penerbitan TDG	1	21 Kec. Di Kab. Lumajang	15	laporan	4.500.000	DAU
				Pendataan Gudang	2	21 Kec. Di Kab. Lumajang	18	Kecamatan	21.600.000	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				Sosialisasi TDG	3	Kec. Lumajang	30	orang	12.000.000	DAU
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Tersedianya jumlah izin usaha perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase pengecer yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh izin usaha	$x = \frac{\text{(jumlah rekomendasi izin usaha / jumlah pengecer yang mengajukan rekomendasi izin usaha)}}{\text{}} \times 100\%$			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	50	%	12.050.000	DAU
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen tahun N			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	dokumen	12.050.000	DAU
				Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol	1	kab. Lumajang	21	Kec	8.550.000	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				update data ijin usaha perdagangan minuman beralkohol Golongan B dan C	2	kab. Lumajang	21	Kec	3.500.000	DAU
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pelaku usaha yang terfasilitasi	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi	$x = \text{Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi tahun N}$			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	pelaku usaha	12.050.000	
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah laporan tahun N			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	laporan	12.050.000	
				Pendataan Pelaku Usaha Bahan Berbahaya	1	21 Kec di Kab. Lumajang	1	dokumen	3.500.000	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				Pengawasan pelaku usaha, produsen/pengguna Bahan Berbahaya	2	kab. Lumajang	2	Laporan	8.550.000	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Jumlah Pasar berstandar SNI	Persentase Jumlah Pasar sesuai standar SNI	Jumlah PASAR Berstandar SNI / jumlah total pasar daerah Kabupaten Lumajang			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	3,45	%	6.457.443.988	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun / direhab	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun/ direhab	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun / direhab			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	8	unit	5.339.255.988	
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	29	unit	2.403.336.700	
				Penyediaan Gaji Tenaga Kontrak	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	3	Orang	62.400.000	
				Monev rutin Sarana prasarana pasar	2	semua pasar daerah	29	pasar	18.000.000	
				Pembayaran sewa tanah PT. KAI	3	Pasar Senggol dan Pertokoan Toga	2	pasar	148.500.000	
				Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan (pagar Lampu Keliling)	4	Kec.Lumajang	1	pasar	0	
				Rehabilitasi Pasar Ranuyoso (Talang Los Utara)	5	Kec. Ranuyoso	1	pasar	200.000.000	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				Rehabilitasi Pasar Yosowilangun (drainase)	6	Kec.Yosowilangun	1	pasar	80.000.000	
				Rehabilitasi Pasar Randuagung (Los belakang)	7	Kec. Randuagung	1	pasar	200.000.000	
				Pemeliharaan Pasar Senduro (Tambal sulam atap+ pemeliharaan kamar mandi)	8	Kec.Lumajang	1	pasar	50.000.000	
				Pemeliharaan Pasar Kunir(normalisasi drainase)	9	Kec.Lumajang	1	pasar	0	
				Pemeliharaan Pasar Candipuro(sumur bor+ tandon+sanyo+ jaringan air bersih di bangunan baru+ tambah daya listrik)	10	Kec.Lumajang	1	pasar	50.000.000	
				Pemeliharaan Pasar Baru(talang+ penerangan)	11	Kec.Lumajang	1	pasar	50.000.000	
				Rehabilitasi Pasar Serangin(pembuatan kamar mandi)	12	Kec.Lumajang	1	pasar	50.000.000	
				Rehabilitasi Pasar Tempeh(Pembuatan drainase dan tambatan)	13	Kec. Tempeh	1	pasar	120.000.000	
				Rehabilitasi Pasar Higienis(rehab Los)	14	Kec.Lumajang	1	pasar	120.000.000	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				Pemeliharaan Pasar Yosowilangun(Normalisasi drainase)	15	Kec.Lumajang	1	pasar	0	
				Pemeliharaan Pasar Klakah(pagar pengaman kawat dan pagar pintu)	16	Kec.Lumajang	1	pasar	0	
				Rehabilitasi Pasar Klojen menuju SNI (atap kios lama, keramik bangunan baru, turbin ventilator , sumur bor+sanyo +tambah daya listrik)	17	Kec.Lumajang	1	pasar	500.000.000	
				Pemeliharaan Pasar Klojen(normalisasi drainase+tambal sulam atap)	18	Kec.Lumajang	1	pasar	0	
				Pembuatan DED	19	Pasar Yosowilangun dan Pasar Baru	2	dokumen	210.000.000	
				SLF Rest Area Agropolitan	20	Kec. Senduro	1	dokumen	172.436.700	
				Pemeliharaan Pasar Krai(kamar mandi)	21	Kec.Yosowilangun	1	pasar	50.000.000	
				Pemeliharaan Pasar Pronojiwo(tambatan hewan)+SSI	22	Kec.Lumajang	1	pasar	0	
				Rehabilitasi Sanitasi Pasar	23	Kab.Lumajang	2	pasar	10.000.000	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				Instalasi listrik dan lampu sorot (pasar Agro)	24	Kec.Senduro	1	pas ar	12.00 0.000	
				Pendamping TP dan DAK	25				300.0 00.00 0	
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedian ya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	29	Unit	2.935 .919. 288	
				Pembayaran Upah TKB (PASAR)	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	87	oran g	1.574 .400. 000	
				Penggunaan Berkas Los, Bedak,Kios	2	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	24000	Lem bar	6.000 .000	
				Aplikasi Perijinan dan retribusi	3	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	apli kasi	0	
				Bimtek Verifikasi dan Monev perijinan untuk koordinator	4	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	kegi atan	3.000 .000	
				Verifikasi Lapangan Perizinan	5	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	96	kali	24.00 0.000	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				Monitoring evaluasi BMD	6	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	kali	3.600.000	
				Pemeliharaan kendaraan roda 3	7	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	Unit	43.800.000	
				Pengelolaan kebersihan pasar	8	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	99	orang	247.296.000	
				Pengamanan dan penertiban jalan lingkungan pasar jelang lebaran	9	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	10	orang	21.000.000	
				Pengadaan Roda 3	10	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	3	Unit	0	
				Pengadaan Gergaji chainsaw	11	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	3	unit	0	
				pengadaan tempat sampah besar berroda	12	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	30	unit	0	
				pengadaan troli gudang besi	13	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	10	unit	0	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				pembayaran outsourcing pasar agro	14	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	paket	259.200.000	
				Launching Rest Area Pasar Agropolitan	15	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	kegiatan	100.000.000	
				NA UPT Rest Area Pasar Agropolitan	16	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	100.000.000	
				Belanja Peralatan dan Mesin untuk Rest Area	18	Rest Area Agropolitan	1	paket	553.623.288	
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terselenggaranya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan terhadap pedagang	Jumlah Pedagang yang dibina / Total jumlah pedagang pada pasar daerah yang dikelola diskopindag			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	11	%	1.118.188.000	DAU
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Total Jumlah jenis dokumen			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	Dokumen	1.076.288.000	DAU
				Pembayaran Upah TKB (PASAR)	1	29 Pasar	44	Orang	840.000.000	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				Monitoring Pendataan benda berharga dan pemusnahan bonggol karcis	2	29 Pasar	29	Pasar	43.200.000	DAU
				Pemungutan Retribusi dan Administrasi	3	29 Pasar	71	Orang	184.688.000	DAU
				Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Pasar dan Benda Berharga	4	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	29	Pasar	8.400.000	DAU
				Study Tiru Pasar BersNI, Pasar Segar Aman Sehat, E-Retribusi	5	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	30	Orang	0	DAU
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terselenggaranya Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Total Jumlah jenis dokumen			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	13	Dokumen	41.900.000	DAU
				Rapat koordinasi dan evaluasi pengelola SDP	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	30	Orang	5.400.000	DAU
				Implementasi e retribusi	2	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	200	Orang	36.500.000	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya barang kebutuhan pokok yang harganya dan penting yang harganya terkendali	Persentase pengendalian stabilisasi barang kebutuhan pokok dan barang penting	$x = (\text{standard deviasi harga tahun} / \text{rata2 harga tahun}) * 100\%$			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	80%	%	987.655.000	DAU
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Meningkatnya barang kebutuhan pokok dan penting yang stok dan harganya terkendali	Jumlah harga barang kebutuhan pokok yang dikendalikan	Jumlah harga barang kebutuhan pokok yang dikendalikan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	13	barang	899.330.000	DAU
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan tahun N			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	laporan	128.420.000,00	DAU
				Honor TKB	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4	org	81.600.000	DAU
				pemantauan harga di distributor	2	Pasar rakyat di kab. Lumajang	12	bulan	29.220.000	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				Pelaksanaan koordinasi terkait harga dan stok barang kebutuhan pokok	3	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4	kali	1.800.000	DAU
				Pelaksanaan Forum Komunikasi Distributor	4	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	kali	13.400.000	DIF
				pelaksanaan sidak terkait ketersediaan stok	5	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4	kali	2.400.000	DAU
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah laporan tahun N			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	laporan	667.200.000	DAU
				Pelaksanaan koordinasi penginputan harga bahan pokok pada aplikasi sistem informasi	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	20	kali	7.200.000	DIF
				Optimalisasi Warung TPID di Pasar rakyat	2	Kabupaten Lumajang	5	pasar	660.000.000	DIF

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan tahun N			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	laporan	103.710.000	DAU
				Operasi pasar untuk barang kebutuhan pokok yang harganya tidak terjangkau	1	21 Kecamatan di kab. Lumajang	21	Kec	103.710.000	DIF + DAU
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah obyek pengawasan pupuk dan pestisida	Jumlah obyek pengawasan pupuk dan pestisida	Jumlah obyek pengawasan pupuk dan pestisida			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	168	unit	88.325.000	
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	Laporan	88.325.000	
				Pelaksanaan Koordinasi KP3 dan stakeholder	1	Kab. Lumajang	1	laporan	8.325.000	DAU+ DIF

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				Monitoring dan evaluasi penyaluran pupuk dan kelengkapan legalitas dokumen (perizinan dan penyaluran)	2	Kab. Lumajang	168	Kios	80.000.000	DAU
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Nilai ekspor	Nilai ekspor	Nilai ekspor			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	##### ##### ####		436.942.500	
		Nilai perdagangan antar daerah	Nilai perdagangan antar daerah				5.924.944.703.361			
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Nilai Omzet Promosi dagang	Nilai omzet promosi dagang	Nilai omzet promosi dagang			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	450.000.000	rupiah	436.942.500	
Pameran Dagang Nasional	Terfasilitasinya pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada pameran dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Jumlah pelaku usaha yang pameran tahun N				20	org Pelaku usaha	129.826.500	
				Fasilitasi Pameran APKASI	1	Jakarta	20	org Pelaku usaha	129.826.500	DAU
Pameran Dagang Lokal	Terfasilitasinya pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran	Jumlah pelaku usaha yang pameran tahun N				66	org Pelaku usaha	182.606.000	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
	pameran dagang Lokal	Dagang Lokal								
				Fasilitasi kegiatan pameran Pameran Jatim Fair	1	Surabaya	20	org Pelaku usaha	62.660.000	DAU
				Fasilitasi kegiatan pameran Pameran Dekranasda	2	Surabaya	20	org Pelaku usaha	61.996.000	DAU
				Fasilitasi pameran batik fair	3	Surabaya	20	org Pelaku usaha	47.950.000	DAU
				Mengikuti pameran MTQ Provinsi	4	Surabaya	6	pelaku usaha	10.000.000	DAU
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Terfasilitasinya pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang ikut misi dagang tahun N			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	6	pelaku usaha	124.510.000	
				Mengikuti Misi Dagang skala Nasional	1	Nasional	2	pelaku usaha	29.510.000	DAU
				Pembuatan Video Promosi Produk Ekspor	2	Kab. Lumajang	1	video	75.000.000	DAU
				Sosialisasi Kebijakan Prosedur Ekspor	3	Kab. Lumajang	40	org	20.000.000	DAU
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya Tingkat Kepatuhan WTU	Tingkat Kepatuhan WTU	$x = \frac{\text{jumlah WTU patuh}}{\text{jumlah potensi WTU}} \times 100\%$			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	80	%	543.219.000	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	meningkatkan nilai retribusi pelayanan tera/tera ulang	jumlah WTU yang melaksanakan tera tera ulang	x=nilai retribusi pelayanan tera/tera ulang			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2067	WTU	543.219.000	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Meningkatkan Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera tahun N			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12000	Unit	459.855.000	
				Honorarium tenaga kerja Bulanan	1	Kabupaten Lumajang	5	orang	103.200.000	DAU
				Pelayanan tera, tera ulang	2	Merata di Seluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang	12000	UTTP	154.800.000	DAU
				verifikasi dan kalibrasi alat standar kemetrologian	5	DI Yogyakarta, dan Kantor UML Kab. Lumajang	689	unit alat standar	15.855.000	DAU
				Penyediaan Pos Ukur Ulang di pasar daerah	3	pasar sukodono dan pasar pasirian	2	unit	180.000.000	DIF
				Servis Timbangan Pos Ukur Ulang	4	Pasar Klojen	1	unit	6.000.000	DAU
				Pendataan UTTP	6	205 desa dan kelurahan di Kabupaten Lumajang	1	data	0	DAU
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi yang dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah pelaku usaha di bidang Metrologi Legal yang diawasi/bin			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1507	orang	83.364.000	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
			a tahun N							
				Honorarium tenaga kerja Bulanan	1	Kab. Lumajang	1	orang	20.400.000	DAU
				Sosialisasi Aparat Kecamatan dan Desa sebelum tera	2	21 Kecamatan	420	orang	17.100.000	DAU
				Pengawasan UTTP dan Pembinaan WTU	3	Kab. Lumajang	950	ORANG	30.000.000	DAU
				Pembinaan, Pendampingan, dan Pengawasan BDKT	4	Kab. Lumajang	32	pelaku usaha	15.864.000	DAU
				Seminar Edukasi Metrologi Legal untuk Guru dan siswa SMP (Hari Metrologi Dunia)	5	Kab. Lumajang	105	orang	0	DAU
				Lomba Reels Instagram untuk siswa atau lembaga setingkat SMP (Hari Metrologi Dunia)	6	Kab. Lumajang	3 juara	masayarakat	0	DAU
				Olimpiade Online dan Zoom bagi pelajar setingkat SMP (Hari Metrologi Dunia)	7	Kab. Lumajang	5 juara	kegiatan	0	DAU
				Seremonia I Puncak Hari Metrologi Dunia (jalan santai)	8	Kab. Lumajang	1	laporan	0	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya pertumbuhan nilai perdagangan dalam daerah	Persentase pertumbuhan nilai perdagangan dalam daerah	(Nilai perdagangan dalam daerah Tahun N - Nilai Perdagangan Dalam Daerah N-1) / Nilai Perdagangan Daerah N-1 x 100%			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	5	%	286.850.000	DAU
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Nilai perdagangan dalam daerah	Nilai perdagangan dalam daerah	x = nilai perdagangan dalam daerah tahun N			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	8.604.645.491.050,00		286.850.000	DAU
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang ikut Pameran tingkat kabupaten Tahun N			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	225	umkm	166.850.000	DAU
				Penyelenggaraan Pasar Ramadan	1	Kab. Lumajang	100	umkm	116.850.000	DAU
				Pameran Deskranada Kabupaten Lamajang	1	Kab. Lumajang	125	umkm	50.000.000	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				Pameran tk. Kabupaten yang mendukung event2 OPD Terkait (Mahameru Accoustic, harjalu, hari santri, agustusan, MTQ)	2	Kab. Lumajang	2	kegiatan	0	DAU
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Jumlah UMKM yang punya akses pemasaran Tahun N			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	5	UMKM	120.000.000	DAU
				Fasilitasi UMKM untuk Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi (Temu Mitra)	1	Kab. Lumajang	30	UMKM	30.000.000	DAU
				monev toko modern	2	Kab. Lumajang	10	toko modern	3.000.000	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				sosialisasi terkiat kemitraan umkm dengan toko modern	3	Kab. Lumajang	20	org	12.000.000	DAU
				penyusunan kebijakan daerah tentang toko modern wajib menyediakan space untuk produk lokal	4	Kab. Lumajang	1	dokumen	75.000.000	DIF
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										DAU
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya Nilai produksi industri	Nilai produksi industri	Nilai produksi industri			Lumajang	1.491.388.500.000	Rp.	920.542.090	DAU
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya fasilitasi jumlah industri dalam rencana pembangunan	Jumlah industry dalam rencana pembangunan kabupaten yang difasilitasi	Jumlah industry dalam rencana pembangunan kabupaten yang difasilitasi			Lumajang	400	IKM	920.542.090	DAU
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri			Lumajang	2	Dokumen	119.999.000	DAU
				Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Perda Perindustrian	1	Lumajang	1	Dokumen	75.000.000	DIF
				Penyusunan Perbup RIPIK	2	Lumajang	1	Dokumen	10.224.000	DAU
				Monev P3DN	3	Lumajang	4	kali	24.775.000	DAU + DIF

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				Verifikasi Realisasi PDN	4	Lumajang	92	OPD	10.000.000	DAU + DIF
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			Lumajang	3	dokumen	800.543.090	DAU
				Fasilitasi dan Pendampingan sertifikasi Halal Self Declare	1	Lumajang	25	IKM	10.000.000	DAU + DIF
				Pendampingan Sertifikasi TKDN Bagi IKM	2	Lumajang	15	IKM	197.600.000	DIF
				Pendampingan standarisasi dan sertifikasi produk IKM (Uji Nutrisi dan Merek)	3	Lumajang	30	IKM	90.000.000	DIF
				Pelatihan peningkatan mutu produk melalui GMP	4	Lumajang	30	IHT	79.446.090	DBHCHT
				Pelatihan Diversifikasi produk IHT	5	Lumajang	60	IHT	150.000.000	DBHCHT
				Pelatihan peningkatan ketrampilan greader	6	Lumajang	30	IHT	50.000.000	DBHCHT

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				Pendampingan (Pembinaan dan Penyuluhan) terhadap Produksi di IKM Kopi dan Keripik	7	Lumajang	30	IKM	0	DAU
				Monitoring dan Evaluasi perkembangan usaha bagi IK Olahan Susu	8	Senduro	6	IKM	0	DAU
				Sosialisasi BPOM bagi IK Olahan Susu	9	Lumajang	25	IKM	30.00 0.000	DAU + DIF
				Pendampingan Tindak Lanjut Hasil Kurasi Produk IKM Aneka Keripik dan Kopi	10	Lumajang	35	IKM	12.85 0.000	DAU + DIF
				Pelatihan Pembuatan Konten Pemasaran Online bagi IK Aneka Keripik, Kopi, Susu	11	Lumajang	40	IKM	40.00 0.000	DAU + DIF
				Pelatihan Desain dan Bantuan Kemasan bagi IK Aneka Keripik, Kopi	12	Lumajang	34	IKM	78.12 9.000	DAU + DIF
				Pelatihan Diversifikasi Produk Kopi	13	Lumajang	30	IKM	27.26 8.000	DAU + DIF
				Pembuatan Company Profile	15	Lumajang	15	Buku	5.250 .000	DAU + DIF

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				Pengadaan Peralatan UMKM (Pengemasan/Packaging)		Desa Kaliboto Lor	15	Kelompok	30.000.000	DAU
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya Jumlah rekomendasi perolehan IUI, IPU, IUKI dan IPKI	Persentase jumlah izin yang diterbitkan	jumlah izin yang diterbitkan / jumlah pengajuan izin			Lumajang	100	%	11.650.000	DAU
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah	Jumlah rekomendasi IUI, IPU, IUKI dan IPKI Yang Diterbitkan	Jumlah rekomendasi IUI, IPU, IUKI dan IPKI Yang Diterbitkan			Lumajang	2	dokumen	11.650.000	DAU
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri			Lumajang	1	Dokumen	6.850.000	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
	n/Kota	an Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat								
				Pengawasan Izin Usaha Industri	1	Lumajang	1	Dokumen	3.250 .000	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri				1 dokumen	4.800.000	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
		yang menjadi kewenangan pemerintah pusat								
				Pendampingan IKM terkait penyesuaian perizinan dasar sebagai pemenuhan komitmen IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang terintegrasi dengan siinas	1	Lumajang	20	IKM	4.800.000	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya Jumlah Database IKM yang terupdate	Persentase jumlah IKM yang mengupdate data di SIINAS	Jumlah IKM Yang Datanya Terupdate di SIInas / jumlah IKM yang terdaftar di SIINAS 8 100%			Lumajang	61,45	%	8.706 .050	DAU
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah dokumen informasi industri yang tersedia	Jumlah dokumen informasi industri yang tersedia	Jumlah dokumen informasi industri yang tersedia			Lumajang	2	dokumen	8.706 .050	DAU
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Tersedimentasi dan Terpublikasinya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri			Lumajang	1	dokumen	5.256 .050	DAU
				Pelaporan data informasi industri	1	Lumajang	30	IKM	5.256 .050	DAU
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota			Lumajang	1	dokumen	3.450 .000	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				Monitoring dan Evaluasi perkembangan usaha	1	Lumajang	5	IKM	2.250.000	DAU
				Pengumpulan dan Pengolahan Data Industri	2	Lumajang	1	Dokumen	1.200.000	DAU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	$x = \frac{(\text{jumlah pemenuhan operasional perkantoran})}{(\text{jumlah kebutuhan operasional perkantoran})} \times 100\%$			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100	%	11.482.571.573	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Persentase fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	$x = \frac{(\text{jumlah pemenuhan dok. perencanaan, penganggaran dan evaluasi})}{(\text{jumlah kebutuhan dok. perencanaan, penganggaran dan evaluasi})} \times 100\%$			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100	%	26.268.000	DAU
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	$x = \text{Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah}$			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	3	dokumen	8.818.000	DAU
				Penyusunan Renja PD dan perubahannya	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	dokumen	2.720.000	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				Penyusunan Renstra PD	2	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	2.720.000	
				Forum Perangkat daerah	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	Kegiatan	3.378.000	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	x = jumlah dokumen RKA tahun berikutnya			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	6.770.000	DAU
				Penyusunan dokumen RKA SKPD	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	6.770.000	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	x = jumlah dokumen pergeseran dan perubahan RKA tahun berjalan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	1.854.000	DAU
				Penyusunan dokumen P- RKA SKPD	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	1.854.000	DAU
Koordinasi dan Penyusunan	Tersedianya Laporan	Jumlah Laporan Capaian	x= jumlah laporan LKJ			Dinas Koperasi, UKM,	5	laporan	3.264.000	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Triwulan dan LKJiP			Perindustrian dan Perdagangan				
				Penyusunan LKJiP	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	5	laporan	3.264 .000	DA U
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	x = jumlah laporan FKP dan Evaluasi Renja			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4	laporan	5.562 .000	DA U
				Penyusunan E-81 dan Monitoring Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4	laporan	1.854 .000	DA U
				Penyusunan RB	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	Dokumen	1.854 .000	DA U
				Penyusunan SPIP	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	Dokumen	1.854 .000	DA U

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	$x = \frac{\text{jumlah pemenuhan fasilitasi administrasi keuangan}}{\text{jumlah kebutuhan fasilitasi administrasi keuangan}} \times 100\%$			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100	%	7.669.103.153	DAU
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	$x = \text{Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN}$			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	75 orang, 12 bulan	O/B	7.601.398.153	DAU
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	75 orang, 12 bulan	O/B	7.601.398.153	DAU
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	$x = \text{Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN}$			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	dokumen	56.952.000	DAU
				Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	dokumen	56.952.000	DAU
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	$x = \text{Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD}$			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	Dokumen	5.000.000	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				Penyusunan laporan bulanan akuntansi	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	Dokumen	5.000.000	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	x= Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	laporan	4.653.000	DAU
				Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	laporan	4.653.000	DAU
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	x = Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	Dokumen	1.100.000	DAU
				Penyusunan bahan pemeriksaan laporan keuangan	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	Dokumen	1.100.000	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	$x = (\text{jumlah pemenuhan fasilitasi administrasi BMD}) / (\text{jumlah kebutuhan fasilitasi administrasi BMD}) \times 100\%$			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100	%	12.638.000	DAU
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen RKBMD dan RKBMD-P)		1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	Dokumen	1.754.000	DAU
				Penyusunan RKBMD		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	dokumen	1.754.000	DAU
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	$x = \text{Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD}$			Pasar dalam lingkup Dinas	1	Dokumen	7.800.000	DAU
				Monitoring Pengamanan Aset		Pasar dalam lingkup Dinas	1	dokumen	7.800.000	DAU
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	$x = \text{Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD}$			Diskopindag	4	laporan	3.084.000	DAU
				Penyusunan Laporan BMD		Diskopindag	4	laporan	3.084.000	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	$x = \frac{\text{jumlah pemenuhan fasilitasi administrasi pendapatan @daerah kewenangan PD}}{\text{jumlah kebutuhan fasilitasi administrasi pendapatan @daerah kewenangan PD}} \times 100\%$			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100	%	31.889.500	DAU
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya pengelolaan, pemeliharaan, dan pelaporan data retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	$x = \text{Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah}$			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	laporan	28.000.000	DAU
				Pengolahan data penyetoran Retribusi harian	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	laporan	28.000.000	DAU
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Tersedianya dokumen ketetapan wajib retribusi daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	$x = \text{Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah}$			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	dokumen	3.889.500	DAU
				Monitoring evaluasi penerimaan retribusi	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	dokumen	3.889.500	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	x = (jumlah pemenuhan fasilitasi administrasi kepegawaian PD/ jumlah kebutuhan fasilitasi administrasi kepegawaian PD) * 100%				100	%	86.580.000	DAU
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	x = Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Batik Dinas		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	paket	86.580.000	DAU
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitasi Administrasi Umum PD	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	x=(jumlah pemenuhan fasilitasi administrasi rasi Umum)/(jumlah kebutuhan fasilitasi administrasi rasi Umum) x 100%			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100	%	1.222.368.920	DAU
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	x=Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	paket	49.993.860	DAU
				Penyediaan instalasi listrik dan penerangan	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	Paket	49.993.860	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	x=Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4	Paket	601.925.210	DAU
				Penyediaan alat kebersihan dan bahan kebersihan	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	Paket	99.944.933	DAU
				Penyediaan ATK (SDP kertas 81 rim)	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	Paket	312.412.219	DAU
				Penyediaan perabot kantor	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	Paket	10.396.260	DAU
				Materai	2	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	Paket	1.000.000	DAU
				Logistik Rest Area Agropolitan	17	Rest area Agropolitan	1	paket	178.171.798	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	x=Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	paket	137.571.350	DAU
				Penyediaan barang cetakan	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	paket	137.571.350	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan	x=Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	dokumen	7.200.000	DAU
				Penyediaan bahan bacaan (koran)	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	dokumen	7.200.000	DAU
Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	x=Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	paket	19.800.000	DAU
				Pengisian tabung pemadam kebakaran		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	paket	19.800.000	DAU
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	x=Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	30	laporan	12.927.500	DAU
				Penyediaan Makan dan Minum Tamu		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	30	laporan	12.927.500	DAU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	x=Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	90	laporan	392.951.000	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				Penyediaan Makanan dan Minum Rapat	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	300	orang	30.600.000	DAU
				Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	1	Provinsi Jawa Timur	116	kali	163.155.000	DAU
				Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi	1	Jawa Timur dan DKI Jakarta	83	kali	164.196.000	DAU
				Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Kabupaten Lumajang	20	kali	35.000.000	DAU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya fasilitasi pengadaan BMD	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	$x = \frac{\text{(jumlah pemenuhan fasilitasi pengadaan BMD / jumlah kebutuhan fasilitasi pengadaan BMD)}}{100\%}$			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100	%	90.000.000	DAU
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	$x = \text{Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan}$			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	171	unit	0	DAU
				Pengadaan printer laser	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4	unit	0	DAU
				Pengadaan laptop		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4	unit	0	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				Pengadaan komputer		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4	unit	0	DAU
				printer dot matrik		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4	unit	0	DAU
				monitor		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	6	unit	0	DAU
				AC split		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	5	unit	0	DAU
				AC standing		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	3	unit	0	DAU
				Blower		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2	unit	0	DAU
				kursi kerja		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	25	unit	0	DAU
				Kursi lipat		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100	unit	0	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				Rak besi siku		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	10	meter	0	DAU
				Blower		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	unit	0	DAU
				Pengadaan Mesin Fotocopy	2	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	unit	0	DAU
				Pengadaan Kamera	2	Kec. Lumajang	1	Unit	0	DAU
				scanner	2	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	unit	0	DAU
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	x = Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	unit	75.000.000	DAU
				Pengembangan aplikasi SIDILAN	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	unit	75.000.000	DAU
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	x = Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	unit	15.000.000	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				Instalasi Listrik	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	unit	15.000.000	DAU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	$x = (\text{jumlah pemenuhan fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor}) / (\text{jumlah kebutuhan fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor}) \times 100\%$			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100	%	1.837.674.000	DAU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	$x = \text{Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan}$			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	laporan	762.920.000	DAU
				Penyediaan listrik	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	bulan	710.000.000	DAU
				Penyediaan telepon	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	bulan	1.920.000	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub/ Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				Penyediaan air	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	bulan	15.000.000	DAU
				Penyediaan telepon dan internet	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	bulan	36.000.000	DAU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	x=Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	laporan	1.074.754.000	DAU
				Penyediaan upah tenaga kerja kontrak	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	bulan	332.400.000	DAU
				Cleaning Service	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	bulan	130.000.000	DAU
				Petugas Kebersihan	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	bulan	36.000.000	DAU
				Tenaga Kerja Bulanan (keamanan kantor)	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	bulan	72.000.000	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				Pengemudi	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	bulan	18.000.000	DAU
				Iuran Sampah	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	bulan	2.400.000	DAU
				Retribusi Sampah Pasar	1	Kab. Lumajang	12		139.200.000	DAU
				BPJS Kesehatan	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	bulan	310.984.800	DAU
				BPJS Ketenagakerjaan	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	bulan	15.022.800	DAU
				BPJS Ketenagakerjaan	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12	bulan	18.746.400	DAU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya fasilitasi pemeliharaan BMD	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	$x = \frac{\text{jumlah pemenuhan fasilitasi pemeliharaan BMD}}{\text{jumlah kebutuhan fasilitasi pemeliharaan BMD}} \times 100\%$			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100	%	506.650.000	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	x=Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	61	unit	351.500.000	DAU
				Pemeliharaan kendaraan operasional	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	9	unit	306.800.000	DAU
				Pembayaran pajak STNK	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	61	unit	26.700.000	DAU
				Pembayaran ganti plat	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	19	unit	18.050.000	DAU
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	x=Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	171	unit	114.500.000	DAU
				Pemeliharaan printer	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	60	unit	27.500.000	DAU
				Pemeliharaan laptop, PC	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	80	unit	49.000.000	DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				Pemeliharaan AC	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	30	unit	18.000.000	DAU
				Pemeliharaan server	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	unit	20.000.000	DAU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	x=Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	3	Unit	40.000.000	DAU
				Fasade	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	paket	0	DAU
				Rehab Gedung dan aula Diskopindag	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	paket	0	DAU
				Pemeliharaan gedung metrologi	1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1	paket	40.000.000	DAU

❖ DOKUMENTASI KEGIATAN



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lumajang

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

JADWAL SIDANG
TERA, TERA ULANG

**BEBAS
RETRIBUSI**

**PASAR
RANDUAGUNG**

Senin-Rabu, 24-26 Februari 2025

Pendaftaran 09.00-12.00 WIB



BerAKHLAK bangga melayani bangsa



OPERASI PASAR

Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Harga Pangan
Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional 2025

Ir. H. Indah Amperawati, M.Si
Bupati Lumajang

Yudha Adji Kusuma, S.H
Wakil Bupati Lumajang

Balai Kelurahan Ditotrunan	Senin 24 Februari 2025	09.00 WIB
Balai Kelurahan Jogoyudan	Selasa 25 Februari 2025	09.00 WIB
Balai Kelurahan Rogotrunan	Rabu 26 Februari 2025	09.00 WIB
Balai Kelurahan Jogotrunan	Kamis 27 Februari 2025	09.00 WIB
Balai Kelurahan Citrodiwangsan	Senin 03 Maret 2025	09.00 WIB
Balai Kelurahan Tompokersan	Selasa 04 Maret 2025	09.00 WIB
Balai Kelurahan Kepuharjo	Rabu 05 Maret 2025	09.00 WIB

MINYAKITA

Rp. 14.500,- / Botol



BERAS

CENDRAWASIH NAGAYANA

*Kemasan 3kg - Rp40.000,-

*Kemasan 5kg - Rp66.000,-

NAGAYANA UNGU

*Kemasan 3kg - Rp38.000,-

*Kemasan 5kg - Rp64.000,-



Syarat dan Ketentuan :

- Pembelian Maksimal 2 Pcs per Item
- Diharapkan membawa uang pas

Dokumentasi Pelatihan 🌞



AKSESORIS Fair
www.batikborsirfair.com 2025
APR - 04 MEI EXHIBITION HALL GRAND CITY LUMAJANG

Lumajang 30 April 2025

PAMERAN BATIK NASIONAL
JADI LANGKAH STRATEGIS UMKM LUMAJANG NAIK KELAS

Kegiatan ini bukan hanya soal promosi, tapi juga tentang nilai tambah ekonomi. Produk batik dan bordir dari Lumajang punya potensi besar. Kami hadir membawa semangat bahwa UMKM Lumajang siap naik kelas.

Semoga suatu saat nanti kita punya galeri Dekranasda di Lumajang. Jadi, kalau ada wisatawan atau turis yang datang, kita bisa langsung mengenalkan hasil karya daerah kita. Ini akan menjadi etalase kebanggaan Lumajang.

NY. DEWI NATALIA YUDHA ADJI KUSUMA
KETUA DEKRANASDA KABUPATEN LUMAJANG

www.lumajangkab.go.id @lumajangkab @lumajang_kab Kabupaten Lumajang

Ikuti acara
SOSIALISASI
SI DILAN

Bantu pemerintah mengenal usahamu lewat pelaporan data perdagangan dan industri melalui Si Dilan. Makin lengkap datanya, makin mudah kami merumuskan kebijakan dalam melaksanakan pembinaan.

Pelaksanaan Sosialisasi

Kamis dan Jum'at
08 dan 09 Mei 2025

DAFTAR SEKARANG MELALUI LINK

<https://bit.ly/PendaftaranSiDilan>

Kuota Terbatas

INFO LEBIH LANJUT

Whatsapp Only
0851-3678-5834

Catatan :
Link pendaftaran bisa ditutup sewaktu-waktu bila kuota sudah terpenuhi.

Diskopindag Lumajang @diskopindag.lmj diskopindag.lumajang@gmail.com

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember
Road to Sekarkijang Creative Fest 2025
Kurasi UMKM

Timeline

15-22 April 2025 Pendaftaran Peserta 28 April 2025 Pengumuman
23-25 April 2025 Seleksi 5-7 Mei 2025 Kurasi

Persyaratan dan Ketentuan Peserta

- Usaha berlokasi di Sekarkijang (Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi).
- Produk mainan olahan (termasuk rempah-rempah), fashion, kopi, dan kriya.
- Usaha berjalan minimal 1 tahun.
- Omset minimal 30 juta per bulan.
- Memiliki legalitas usaha: NIB (wajib) dan PIRT, Sertifikat halal, HACCP, dll (opsional).
- Memiliki smartphone dengan aplikasi e-commerce, minimal whatsapp business.
- Berkomitmen menjadi UMKM mitra/binaan Bank Indonesia dan Saat ini tidak menjadi UMKM binaan Bank Indonesia. Selanjutnya, kami telah menyusun google form pendaftaran yang akan diisi oleh calon peserta kurasi UMKM (terlampir).

Link Registrasi

<https://bit.ly/KurasiUMKM2025>

Contact Person

+62 812-3451-2386 (Fatoni)
+62 857-3220-1553 (Atiya)

www.bi.go.id @bank_indonesia_jember cnp.rupiah.jember Bank Indonesia Jember bankindonesiajember



**DISKOPINDAG
KAB. LUMAJANG**



Yuk Ikuti Sosialisasi
Lumajang Tulen

Apa sih lumajang tulen itu??

Lumajang Tulen (Lumajang Tumbas Online) adalah sebuah terobosan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk membantu Produk UMKM Lokal lebih di kenal masyarakat luas.

Pelaksanaan Sosialisasi Lumajang Tulen



Selasa - Rabu
06 -07 Mei 2025

Daftar sekarang melalui link berikut:

<https://bit.ly/PendaftaranSosialisasiLumajangTulen>

Kuota *Terbatas*

Catatan :
Link pendaftaran bisa ditutup sewaktu-waktu bila kuota sudah terpenuhi.

 Diskopindag Lumajang

 @diskopindag.lmj

 diskopindag.lumajang@gmail.com



**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lumajang**



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Asas: Akhlak, Kompetensi, Harmonis, Loyal & Adaptif



**bangga
melayani
bangsa**

**JADWAL SIDANG
TERA, TERA ULANG**

**BEBAS
RETRIBUSI**

Balai Desa Darungan, Yosowilangun (Senin, 28 April 2025)

Balai Desa Sukosari, Kunir (Selasa, 29 April 2025)

Balai Desa Kabuaran, Kunir (Rabu, 30 April 2025)

 Pendaftaran 09.00-12.00 WIB



 @diskopindag.lmj

 Diskopindag Lumajang

 diskopindag lumajang



DOKUMENTASI PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI



DATA KOPERASI YANG TELAH MELAKSANAKAN RAT DI TAHUN 2025

DATA KOPERASI YANG SUDAH BER-RAT S.D TW II 2025

NO	KOPERASI	KECAMATAN	TANGGAL RAT	HASIL RAT
1	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN KEHAKIMAN RUTAN LUMAJANG	LUMAJANG	02 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
2	KOPERASI KONSUMEN KENCANA MAS JAMBKUMBU	PASRUJAMBE	02 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
3	KOPERASI WANITA KARTINI	LUMAJANG	04 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
4	KOPERASI SIMPAN PINJAM KARYA UTAMA LUMAJANG	KLAKAH	05 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
5	KOPERASI PEGAWAI NEGERI ARTHA USAHA	LUMAJANG	07 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
6	KSPP AL-BAROKAH SEJAHTERA	SUMBERSUKO	10 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
7	KOPERASI WANITA CITRA MANDIRI	SUMBERSUKO	11 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
8	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH NINO JAYA BERKAH	KEDUNGJAJANG	11 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU

9	KSPP NURUL IMAN SEJAHTERA	LUMAJANG	15 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
10	Koperasi Pondok Pesantren Syarifudin	KEDUNGAJANG	15 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
11	KOPERASI KONSUMEN PONDOK PESANTREN SYARIFUDDIN	KEDUNGAJANG	15 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
12	KOPERASI WANITA SUMBER REJEKI	SENDURO	17 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
13	KOPERASI WANITA MARIMAR	CANDIPURO	18 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
14	KOPERASI WANITA SEROJA	CANDIPURO	18 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
15	KOPERASI WANITA PONDOK BAMBU	CANDIPURO	18 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
16	KOPERASI WANITA BHAKTI PERTIWI	CANDIPURO	18 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
17	KOPERASI WANITA SRIKANDI	CANDIPURO	18 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
18	KOPERASI WANITA KARYA MANDIRI	CANDIPURO	18 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU

19	KSPP MUSLIMAT SUKA MAJU	CANDIPURO	18 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
20	KOPERASI KONSUMEN MEDIKA RSI LUMAJANG	LUMAJANG	18 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
21	KOPERASI PEGAWAI NEGERI HARAPAN LUMAJANG	YOSOWILANGUN	18 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
22	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA GUYUB RUKUN	ROWOKANGKUNG	18 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
23	KOPERASI PEGAWAI NEGERI MAKMUR SMPN 1 SUKODONO	SUKODONO	18 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
24	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SEDAYU	KLAKAH	18 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
25	KOPERASI KONSUMEN SETIYO PAMITRAN LUMAJANG	TEMPEH	19 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
26	KOPERASI SIMPAN PINJAM SEMANGAT EKONOMI ALA RAKYAT	LUMAJANG	19 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
27	KSPP AL-HIDAYAH BUNDA SAKINAH	YOSOWILANGUN	19 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
28	KOPERASI TAMAN KARYA LESTARI	ROWOKANGKUNG	20 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU

29	KOPERASI WANITA SRIKANDI	PASRUJAMBE	20 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
30	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA MARSUDI AMRIH SANTOSO (KPRI MAS)	LUMAJANG	22 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
31	KSPP AL-HIDAYAH TANJUNG JAYA	YOSOWILANGUN	22 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
32	KOPERASI KASIH SEJAHTERA ABADI	ROWOKANGKUNG	22 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
33	KOPERASI MITRA ARTA ABADI	ROWOKANGKUNG	22 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
34	KOPERASI SIMPAN PINJAM TERATAI MAS	SUKODONO	22 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
35	Koperasi Pegawai Negeri Warga Mulya SMPN 3	LUMAJANG	23 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
36	KOPERASI KONSUMEN AGRO SEMERU BAROKAH	SUKODONO	23 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
37	KOPERASI KONSUMEN BINA EKONOMI BAROKAH	KEDUNGJAJANG	23 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
38	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERBA HASIL	YOSOWILANGUN	24 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU

39	KSPP SAKINAH NURUL HIKMAH	LUMAJANG	25 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
40	KSPP ISTIQOMAH ZAHRA ANNISA PKK RW 05	SUMBERSUKO	25 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
41	KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SETIA KAWAN TEKUNG	TEKUNG	25 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
42	KOPERASI WANITA MAWAR	SUKODONO	25 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
43	KOPERASI PASAR KARSA MULYA	SUKODONO	25 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
44	KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA GANESHA KLAKAH	KLAKAH	25 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
45	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KENCONOWUNGU	LUMAJANG	26 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
46	KOPERASI WANITA WARU INDAH	LUMAJANG	26 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
47	KOPERASI WANITA BUNDA PERTIWI	YOSOWILANGUN	29 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
48	KOPERASI MAISYATUL UMMAH	RANDUAGUNG	29 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU

49	KSPP AL-HIDAYAH LAILATUL HAWA	TEMPURSARI	30 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
50	KOPERASI WANITA MANDIRI	TEMPURSARI	30 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
51	KOPERASI WANITA MELATI	TEMPURSARI	30 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
52	KOPERASI KONSUMEN GANGSAR JAYA ABADI	TEMPURSARI	30 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
53	KOPERASI KONSUMEN SURYA AMANAH TEMPURSARI	TEMPURSARI	30 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
54	KSPP AL-HIDAYAH SEKAR ARUM	TEMPURSARI	30 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
55	KOPERASI WANITA ANGGREK	TEMPURSARI	30 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
56	KSPP PENGAJIAN WANITA AL-HIDAYAH	TEMPURSARI	30 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
57	KOPERASI WANITA MAWAR MULYA	TEMPURSARI	30 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
58	KSPP AL-HIDAYAH ADIBAH SAKINAH	TEMPURSARI	30 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU

59	KOPERASI WANITA NGUDI RAHAYU	TEMPURSARI	30 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
60	KOPERASI WANITA MAWAR INDAH	TEMPURSARI	30 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
61	KOPERASI WANITA ANGGREK INDAH	TEMPURSARI	30 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
62	KSPP MUSLIMAT MAJU BERSAMA	TEMPURSARI	30 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
63	KSPP DIBA IYAH KARUNIA ILLAHI	CANDIPURO	30 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
64	KOPERASI WANITA SEKARWANGI	TEMPEH	30 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
65	KOPERASI PRODUSEN BATIK GUYUB RUKUN	YOSOWILANGUN	30 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
66	KOPERASI WANITA USAHA WANITA	KEDUNGJAJANG	30 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
67	KOPERASI WANITA MANDIRI	KEDUNGJAJANG	30 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
68	KOPERASI WANITA AN NISA	TEMPEH	31 Januari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU

69	Koperasi Unit Desa Baroka	JATIROTO	01 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
70	KOPERASI KONSUMEN KARYAWAN MENAK KONCAR	SUKODONO	01 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
71	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT NU LUMAJANG	LUMAJANG	03 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
72	KOPERASI KONSUMEN GUNUNG TAMBUH MANDIRI	PASIRIAN	07 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
73	KSPP MUSLIMAT TKI PURNA	KUNIR	08 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
74	KOPERASI WANITA AN NISA	YOSOWILANGUN	08 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
75	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA ADIL MAKMUR	RANDUAGUNG	08 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
76	KOPERASI SIMPAN PINJAM MAKMUR SEJAHTERA LUMAJANG	SUKODONO	08 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
77	KOPERASI KONSUMEN KARYAWAN MUSTIKATAMA GROUP	TEMPEH	09 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
78	KOPERASI KONSUMEN KARYAWAN PRIMA RUMAH SAKIT WIJAYA KUSUMA LUMAJANG	LUMAJANG	09 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU

79	KOPERASI KONSUMEN AISIYIAH SURYA MART	YOSOWILANGUN	09 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
80	KOPERASI WANITA AL IKHLAS	SENDURO	10 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
81	KSPP MUSLIMAT KHUSNUL KHOTIMAH	PASRUJAMBE	11 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
82	KOPERASI WANITA SRIKANDI	TEMPEH	12 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
83	KOPERASI KONSUMEN PANGUDI LUHUR LUMAJANG	LUMAJANG	12 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
84	KOPERASI SIMPAN PINJAM SENTRAL ASIA JAWA TIMUR	LUMAJANG	12 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
85	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRASETYA KARYA	LUMAJANG	12 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
86	KOPERASI KONSUMEN ARYA BARATA EKATAMA	LUMAJANG	13 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
87	KOPERASI PEGAWAI NEGERI DWIJA MULYA	GUCIALIT	13 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
88	KOPERASI WANITA BINA USAHA	TEMPEH	14 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU

89	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA ANGKASA	LUMAJANG	14 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
90	KOPERASI KARYAWAN PATRIA	LUMAJANG	14 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
91	KOPERASI SIMPAN PINJAM INDRA KUSUMA	LUMAJANG	14 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
92	KOPERASI KONSUMEN CAMELIA KEBUN KERTOWONO	GUCIALIT	14 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
93	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WARGA WANDIRA YASA	PASIRIAN	15 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
94	KOPERASI WANITA SRIKANDI	TEMPEH	15 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
95	KPRI BAHTERA KENCANA	LUMAJANG	15 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
96	KOPERASI WANITA CITRA SEJAHTERA	LUMAJANG	15 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
97	KOPERASI WANITA MANDIRI	LUMAJANG	15 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
98	Koperasi Baiitul Maal Wat Tanwil (KBMT) Al Ikhlash	LUMAJANG	15 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU

99	KOPERASI WANITA HIDAYAH	LUMAJANG	15 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
100	KSPP NURUL HIKMAH ANNISA	SUMBERSUKO	15 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
101	KOPERASI WANITA SRIKANDI	SUMBERSUKO	15 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
102	KSPP AL-HIDAYAH BAITUL MUTTAQIN	YOSOWILANGUN	15 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
103	KOPERASI WANITA SAKINAH	ROWOKANGKUNG	15 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
104	KSPP MUSLIMATUL HASANAH MANDIRI	ROWOKANGKUNG	15 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
105	KOPERASI KONSUMEN SAIYEG SAEKA KAPTI	RANUYOSO	15 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
106	KOPERASI KONSUMEN KALPATARU MANDIRI LESTARI	LUMAJANG	18 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
107	KOPERASI WANITA PRATIWI	PASRUJAMBE	18 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
108	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DWIJA RAHARJA	CANDIPURO	19 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU

109	KOPERASI UNIT DESA LANGGENG	ROWOKANGKUNG	19 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
110	KOPERASI SIMPAN PINJAM KARYA MAJU BERSAMA LUMAJANG	SUKODONO	19 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
111	KOPERASI WANITA KHARISMA	GUCIALIT	19 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
112	KOPERASI WANITA SUMBER ARTA	TEMPEH	20 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
113	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA TIRTA MUSTIKA	LUMAJANG	20 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
114	KOPERASI KONSUMEN KPRI DWIJA MUKTI KUNIR	KUNIR	20 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
115	KSPP AL-HIDAYAH SEMERU JAYA	CANDIPURO	21 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
116	KOPERASI WANITA SUMBER ILMU	SUMBERSUKO	21 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
117	KOPERASI KONSUMEN BHAKTI YUDHA PERTIWI	SUMBERSUKO	21 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
118	KOPERASI WANITA SUMBER REJEKI	KUNIR	21 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU

119	KOPERASI WANITA BAHAGIA JAYA	KUNIR	21 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
120	Koperasi Wanita Permata	SUKODONO	21 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
121	KOPERASI WANITA AMANAH	PRONOJIWO	22 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
122	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DWIJA UTAMA	PRONOJIWO	22 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
123	KOPERASI WANITA MAKMUR JAYA	PRONOJIWO	22 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
124	KOPERASI WANITA MULYA BHAKTI MAHARANI	PRONOJIWO	22 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
125	KOPERASI WANITA SEJATI	PRONOJIWO	22 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
126	KOPERASI WANITA TUNGGGA DEWI	PRONOJIWO	22 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
127	KOPERASI WANITA KARTINI	TEMPEH	22 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
128	KOPERASI SIMPAN PINJAM MITRA LIMA WIJAYA	LUMAJANG	22 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU

129	Koperasi Pegawai Negeri Handayani	LUMAJANG	22 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
130	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KARYA HUSADA	LUMAJANG	22 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
131	KSPP AL-HIDAYAH TAAWUN AMANAH	TEKUNG	22 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
132	KOPERASI WANITA LESTARI	YOSOWILANGUN	22 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
133	KOPERASI WANITA HARAPAN	ROWOKANGKUNG	22 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
134	KOPERASI WANITA MAWADDAH	ROWOKANGKUNG	22 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
135	KOPERASI KONSUMEN PONDOK PESANTREN MANARUL QURAN	SUKODONO	22 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
136	Koperasi Wanita Teratai	SUKODONO	22 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
137	Koperasi Wanita Nusa Indah	SUKODONO	22 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
138	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WIYATA MANDALA	SUKODONO	22 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU

139	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEWI SRI	KEDUNGAJANG	22 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
140	KOPERASI PRODUSEN MADU KLAKAH SAEMAN	KLAKAH	22 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
141	KSPP AL HIDAYAH CANDI MAKMUR	CANDIPURO	23 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
142	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA ARGO SEMERU	LUMAJANG	23 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
143	KOPERASI KONSUMEN BASKARA JAYA BERKAH	YOSOWILANGUN	23 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
144	KOPERASI KONSUMEN MASYARAKAT MADANI SEJAHTERA	RANDUAGUNG	23 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
145	KOPERASI PRODUSEN KUD SEDYO UTOMO PASIRIAN	PASIRIAN	24 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
146	KOPERASI WANITA AMANAH	TEMPEH	24 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
147	KOPERASI WANITA SRI REJEKI	JATIROTO	24 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
148	KOPERASI PEGAWAI NEGERI SUKSES	TEMPURSARI	25 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU

149	KOPERASI SIMPAN PINJAM MAJU JAYA	LUMAJANG	25 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
150	KOPERASI WANITA KASIH BUNDA	KUNIR	25 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
151	KOPERASI SERBA USAHA ANUGERAH ABADI SEJAHTERA	JATIROTO	25 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
152	KOPERASI PENSIUNAN WREDATAMA PASIRIAN KOPENTAMA PASIRIAN	PASIRIAN	26 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
153	KOPERASI PRODUSEN KUD KARYA TANI PULO	TEMPEH	26 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
154	PRIMKOPPOL RESOR LUMAJANG	LUMAJANG	26 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
155	KSPP QOTMIL QUR AN MUBAROKAH	LUMAJANG	26 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
156	KOPERASI WANITA MELATI	KUNIR	27 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
157	KOPERASI PRODUSEN UNIT DESA SRI TANJUNG KRAI	YOSOWILANGUN	27 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
158	KOPERASI WANITA ARTHA MANDIRI	ROWOKANGKUNG	27 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU

159	KOPERASI WANITA SEJATI	ROWOKANGKUNG	27 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
160	KOPERASI PRODUSEN UNIT DESA TANI MAKMUR SENDURO	SENDURO	27 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
161	Koperasi Unit Desa Sinar Nyata	KLAKAH	27 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
162	KOPERASI ARTHA INDRA ABADI	TEKUNG	28 Februari 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
163	KOPERASI KONSUMEN BLESSING GRAHA SEMERU	LUMAJANG	01 Maret 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
164	KOPERASI WANITA HIDAYAH	GUCIALIT	03 Maret 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
165	KOPERASI WANITA HARAPAN MAJU	SENDURO	04 Maret 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
166	Koperasi Wanita Langgeng	YOSOWILANGUN	05 Maret 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
167	KOPERASI WANITA SRIKANDI	SUMBERSUKO	08 Maret 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
168	KOPERASI WANITA KASIH IBU	SUMBERSUKO	08 Maret 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU

169	KOPERASI WANITA SRIKANDI	TEKUNG	08 Maret 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
170	KOPERASI KONSUMEN K P R I BUDI SANTOSO	SUKODONO	12 Maret 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
171	KSPM MUSLIMAT ZAHROTUL WARDAH	PASRUJAMBE	12 Maret 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
172	KOPERASI WANITA KARTINI	GUCIALIT	13 Maret 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
173	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BINA RAHARJA	SUKODONO	15 Maret 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
174	KOPERASI WANITA AL HIKMAH	KUNIR	18 Maret 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
175	KOPERASI WANITA RAHAYU	ROWOKANGKUNG	19 Maret 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
176	KOPERASI KONSUMEN KPRI MITRA SENDURO	SENDURO	19 Maret 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
177	KOPERASI WANITA ERA MULYA	LUMAJANG	20 Maret 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
178	KOPERASI PONDOK PESANTREN AL - HASANAH	LUMAJANG	20 Maret 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU

179	KOPERASI KONSUMEN LANGGENG SEJAHTERA SPENYOGA	YOSOWILANGUN	20 Maret 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
180	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA ORYZA	TEKUNG	21 Maret 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
181	KOPERASI SIMPAN PINJAM SUMBER BARU REZEKI	LUMAJANG	22 Maret 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
182	KUD SRI REJEKI	SUKODONO	24 Maret 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
183	KOPERASI KONSUMEN PRIMER KARTIKA NARARIYA KIRANA PRIMKOPKAR NARARIYA KIRANA	LUMAJANG	25 Maret 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
184	KOPERASI KONSUMEN PRIMER KARTIKA LABA - LABA	LUMAJANG	25 Maret 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
185	KOPERASI SERBA USAHA CAHAYA	LUMAJANG	25 Maret 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
186	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA ADHYAKSA	LUMAJANG	26 Maret 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
187	Primer Koperasi Wredatama (Primkoptama) PWRI Cab.Lumajang	LUMAJANG	26 Maret 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
188	KOPERASI WANITA SUMBER REJEKI	SUMBERSUKO	26 Maret 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU

189	KOPERASI KONSUMEN KPRI GURU YOSOWILANGUN	YOSOWILANGUN	26 Maret 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
190	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KBMT HIDAYATULLAH	TEMPEH	27 Maret 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
191	KOPERASI KONSUMEN BINTANG ARTHA SEJAHTERA	LUMAJANG	11 April 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
192	KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI TELEKOMUNIKASI LUMAJANG	LUMAJANG	19 April 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
193	KOPERASI KONSUMEN BINTANG LIMA SURYA	TEMPEH	25 April 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
194	Koperasi Surya Agro Mandiri Jawa Timur	LUMAJANG	26 April 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
195	KOPERASI PRODUSEN KUD SIDO MAKMUR LABRUK KIDUL	SUMBERSUKO	26 April 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
196	KOPERASI WANITA RISKI ILAHI	TEKUNG	26 April 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
197	KSPP MIFTAHUL JANNAH SALSABILLAH	SUKODONO	26 April 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
198	KOPERASI WANITA MAHARANI	CANDIPURO	30 April 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU

199	KSPP AL - KAROMAH HIKMAH HIDAYAH	KUNIR	30 April 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
200	KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI PENGADILAN NEGERI LUMAJANG	SUKODONO	02 Mei 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
201	Koperasi Pegawai Negeri Andhini	KEDUNGJAJANG	02 Mei 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
202	KOPERASI SIMPAN PINJAM WAHANA ARTA LAKSANA	CANDIPURO	07 Mei 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
203	KOPERASI SIMPAN PINJAM PERSADA ARTA LAKSANA	PASIRIAN	07 Mei 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
204	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DIAN WIYATA	KLAKAH	17 Mei 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
205	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA MANGGALA	SENDURO	19 Mei 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
206	KOPERASI SIMPAN PINJAM DANA JAYA SENTOSA	LUMAJANG	20 Mei 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
207	KOPERASI WANITA MANDIRI	TEMPEH	21 Mei 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU
208	KOPERASI SIMPAN PINJAM RAHAYU JAWA TIMUR	LUMAJANG	25 Mei 2025	1. Tata tertib disepakati oleh anggota 2. Quorum sah 3. Mengesahkan LPJ Pengurus dan Pengawas 4. Mengesahkan pembagian SHU

NILAI INVESTASI S.D TRIWULAN I 2025



Sumber : DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur

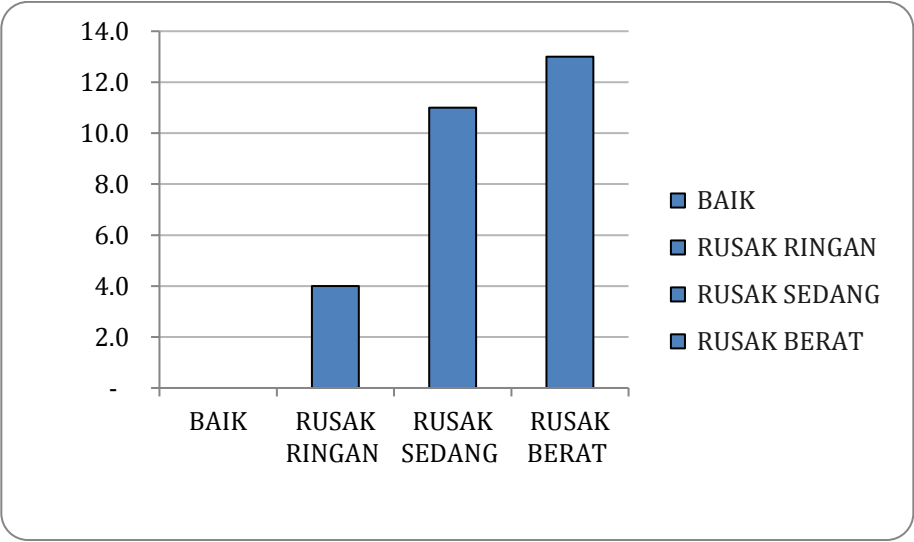
Data yang disajikan adalah data sampai dengan triwulan I dikarenakan data sampai dengan triwulan II akan release di atas tanggal 10 Juli 2025

GRAFIK IPH TAHUN 2025



Sumber : BPS Kab. Lumajang, per minggu ke-4 Juni 2025

GRAFIK KONDISI PASAR DAERAH TAHUN 2025



Sumber : Diskopindag Kab. Lumajang